

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA
BERSAMA FAKIR MISKIN (KUBE-FM) DI KECAMATAN TALLO**

KOTA MAKASSAR

OLEH

MUH HUZAIR ARBY

Nomor Stambuk : 105610507814



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA
BERSAMA FAKIR MISKIN (KUBE-FM) DI KECAMATAN TALLO
KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diusulkan oleh:

MUH HUZAIR ARBY

Nomor Stambuk : 10561 05078 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA
BERSAMA FAKIR MISKIN (KUBE-FM) DI KECAMATAN TALLO
KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar

Muh Huzair Arby

Nomor Stambuk : 10561 05078 14

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Kelompok
Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) Di
Kecamatan Tallo Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Muh Huzair Arby

Nomor Stambuk : 105610507814

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Tahir, M.Si


Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Dr. H. Ihsani Malik, S.Sos., M.Si


Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

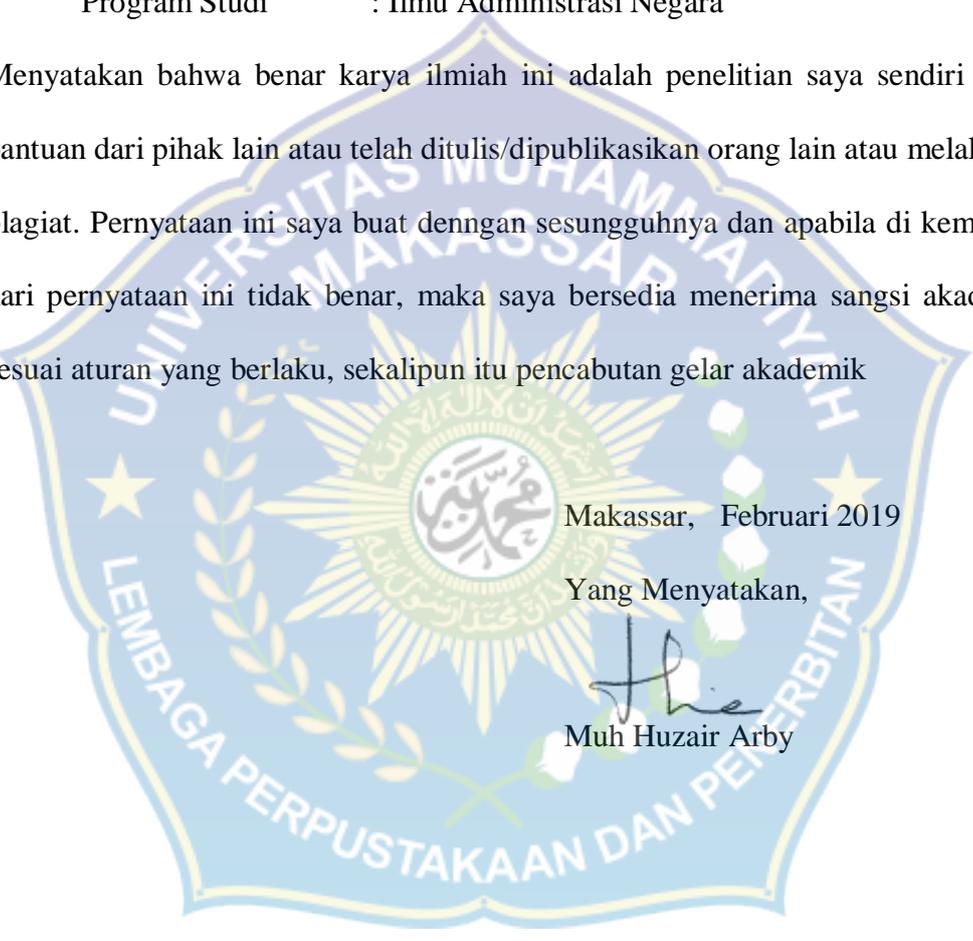
Nama Mahasiswa : Muh Huzair Arby
Nomor Stambuk : 105610507814
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik

Makassar, Februari 2019

Yang Menyatakan,


Muh Huzair Arby

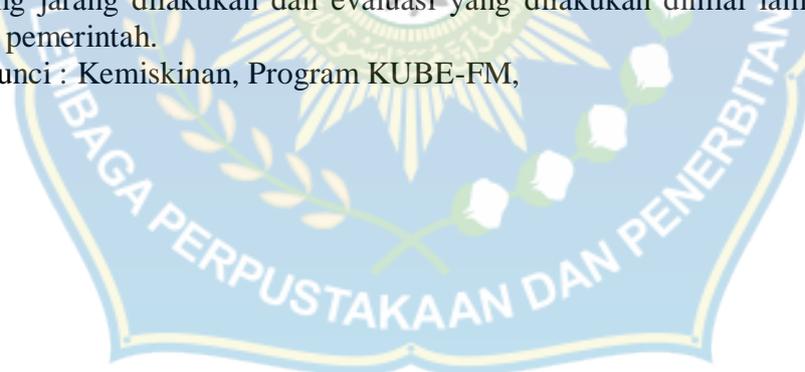


ABSTRAK

Muh Huzair Arby. Efektivitas Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kecamatan Tallo Kota Makassar (dibimbing oleh Muhammad Tahir dan Samsir Rahim).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah kesejahteraan Sosial yang sangat penting untuk segera diatasi mengingat populasinya yang cukup besar dalam masyarakat dan semakin hari populasinya bertambah. Masalah kemiskinan yang dihadapi terutama oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia memang sangatlah kompleks. Berdasarkan masalah kemiskinan tersebut pemerintah kota membuat sebuah program yang dinamakan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM). Berdasarkan program tersebut peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana efektivitas proses sosialisasi, proses pelaksanaan serta proses monitoring dan evaluasi Program KUBE-FM tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah program KUBE-FM tersebut telah berjalan efektif sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang menggambarkan kenyataan dari lapangan yang diteliti. Sumber data dalam penyusunannya berasal dari hasil wawancara beberapa informan yang terkait serta dokumen-dokumen pendukung yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dilihat dari proses sosialisasi, proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi belum berjalan dengan efektif karena sosialisasi yang dilakukan satu kali, penyuluhan keterampilan tidak dilaksanakan dengan maksimal dan pendampingan yang tidak sering dilakukan serta Monitoring terbilang jarang dilakukan dan evaluasi yang dilakukan dinilai lambat dari segi respon pemerintah.

Kata kunci : Kemiskinan, Program KUBE-FM,



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kecamatan Tallo Kota Makassar”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Tahir, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Sis selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Para Staf Fakultas yang memberikan ilmunya, pengalamannya serta informasi akademik.
5. Kepada Dinas Sosial Kota Makassar, Kecamatan Tallo dan masyarakat yang senantiasa membantu penulis untuk memberikan informasi yang menjadikan skripsi bisa terselesaikan.
6. Secara khusus dan istimewa penulis menyampaikan terimakasih yang tulus kepada Kedua orang tuanya, Muh. Arsyad Da'did dan Bey S.K. Neuwang yang selalumendoakan dan memberikan semangat untuk menjadi orang sukses dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dorongan serta bantuan, baik moril maupun material.
7. Kepada teman dekat saya, Feby, Ummah, Qyah, Riska, Fairah, Ilmy, yang selaluberada di sampingku, membantu, menyemangati dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Kepada senior-seniordan teman-teman seangkatan yang selalumemberikan motivasi dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi.

Terimakasih banyak bantuannya,

kebersama kita akan selalukukenang.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifat mendidik, membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, Februari 2019



DAFTAR ISI

HalamanJudul	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
HalamanPersetujuan.....	iii
Halaman Penerimaan Tim	iv
HalamanPernyataanKeaslianKaryaIlmiah.....	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	7
C. TujuanPenelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Efektivitas.....	9
B. Konsep Sosialisasi, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	16
C. Konsep Program.....	22
D. Konsep Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin.....	24
E. KerangkaPikir	32
F. FokusPenelitian	33
G. DeskriptifFokusPenelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. WaktudanLokasiPenelitian	35
B. JenisdanTipePenelitian	35
C. Sumber Data.....	36
D. InformanPenelitian	36
E. TeknikPengumpulan Data.....	37
F. TeknikAnalisis Data	38
G. Teknik Pengabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
B. Efektivitas Pelaksanaan Proses Sosialisasi Program KUBE-FM.....	55

C. Efektivitas Proses Pelaksanaan Program KUBE-FM.....	58
D. Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Program KUBE-FM.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA	84
----------------------	----

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

2.1 Bagan Kerangka Fikir..... 33



DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Informan Penelitian 36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah kesejahteraan Sosial yang sangat penting untuk segera diatasi mengingat populasinya yang cukup besar dalam masyarakat dan semakin hari populasinya bertambah. Masalah kemiskinan yang dihadapi terutama oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia memang sangatlah kompleks. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensional, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Seringkali pemikiran mengenai kemiskinan lebih banyak menekankan pada segi-segi emosional atau perasaan yang diselimuti oleh aspek moral dan kemanusiaan, ataupun masih bersifat partisan karena bersangkut paut dengan alokasi sumber daya, sehingga usaha memahami hakekat kemiskinan itu sendiri menjadi kabur. Akibat yang dialami dengan keadaan seperti ini adalah, usaha penanggulangan kemiskinan bersifat parsial, tidak komprehensif, serta hasil yang dicapai dari segala upaya penanggulangan tersebut menjadi tidak tepat sasaran.

Disadari semakin kompleksnya masalah sosial dalam hal ini adalah kemiskinan baik secara kultural maupun struktural. Hal ini mendorong pelaksanaan upaya pemecahan masalah sosial yang lebih sistematis, profesional dan lebih berkesinambungan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah lama merencanakan dan banyak melaksanakan program dan usaha-usaha kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Untuk

mengatasi kemiskinan di Indonesia berbagai program penanggulangan kemiskinan telah digulirkan oleh Pemerintah sejak era Orde Baru hingga saat ini.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang pernah dilaksanakan yaitu: Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Industri Kecil (KIK), Kredit Canda Kulak (KCK), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Padat Karya, Jaring Pengaman Sosial-Program Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (JPS-PDMDKE), Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD), Unit Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UEDSP), Pengembangan Kawasan Terpadu, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Kelompok program ini bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program ini dianalogikan dengan pemberian beras kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya seperti kaum miskin, lansia, korban bencana dan konflik, penyandang cacat, komunitas adat terkecil, yang jumlahnya 19,1 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) secara nasional. Program ini meliputi: Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan), Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PPFM-BLPS) atau dikenal dengan Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE),

dan Padat Karya Produktif serta Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan untuk Pengungsi/Korban Bencana.

Menindaklanjuti pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, Pemerintah Daerah berperan besar untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerintah Daerah dengan didukung *stakeholders* dan masyarakat, dapat mengembangkan prakarsa untuk menyusun berbagai kebijakan dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah juga dapat berperan dengan menyediakan dana atau program pendamping untuk pelaksanaan program-program dari Pemerintah Pusat.

Adanya kondisi sosial seperti ini, tentunya dibutuhkan peran Optimalisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) mulai dari program pengentasan kemiskinan hingga ketersediaan pekerja sosial yang berperan langsung di lapangan untuk turut mengambil peran pada upaya pengentasan kemiskinan. Tentunya juga dibutuhkan dukungan terpadu dan sinergis baik dari pihak Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Propinsi, lembaga-lembaga sosial pemerintah, maupun lembaga sosial non pemerintah.

Dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2009. Kebijakan pemerintah menyangkut pekerja sosial sangat dibutuhkan partisipasinya, baik sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, mewakili lembaga maupun instansi

pelayanan sosial. Hal ini tercantum dalam peraturan daerah Sulawesi Selatan yaitu Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 tentang penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertujuan untuk:

- a. Memberi perlindungan dan pemenuhan hak dasar penduduk miskin dan rumah tangga miskin.
- b. Mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dan rumah tangga miskin.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. Menjamin konsistensi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Daerah No 3 tahun 2012 tentang penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan merupakan upaya pemerintah daerah sekaligus program turunan dari kementerian pusat dalam hal ini kementerian sosial dalam upaya penuntasan kemiskinan. Dalam upaya mengentaskan masalah kemiskinan agar dapat terencana, terarah, terpadu serta tepat sasaran, maka perlunya sebuah aturan/regulasi sebagai dasar/pegangan bagi semua pihak dalam menjalankan tujuan demi menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin,

Kemiskinan di Kota Makassar merupakan masalah yang sangat penting untuk diatasi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, maka dari itu peran Pemerintah Kota Makassar sangat diperlukan. Di kota Makassar, jumlah warga miskin pada tahun 2018 sebanyak 228.144 dari 50.526 KK (TribunMakassar.com). Jumlah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota

Makassar dianggap belum mampu dalam mengatasi lonjakan kemiskinan dengan berbagai kebijakan yang mengarah kepada pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, Kementerian Sosial sebagai lembaga yang berperan pada program pembangunan kesejahteraan sosial dengan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Kementerian Sosial menyelenggarakan Program yang selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai bagian dari Pemerintah Kota Makassar. Program tersebut yaitu Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM).

Program KUBE merupakan program pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial RI khususnya di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif.

Eksistensi dari Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin merupakan salah satu rencana agar pendapatan keluarga dapat meningkat melalui kegiatan ekonomi produktif. Melalui program KUBE-FM diharapkan mampu mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui KUBE-FM masyarakat miskin dapat lebih maju dari segi ekonomi dan sosialnya dan menjadikan usaha yang berkepanjangan. Melalui program ini juga masyarakat miskin dapat saling berbagi pengalaman dan dapat menyelesaikan masalah secara bersama serta bahu-membahu dalam meningkatkan usaha tersebut.

Sesuai dengan ketentuannya KUBE-FM merupakan kumpulan keluarga miskin yang membentuk suatu kelompok usaha untuk tumbuh, berkembang dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain serta tinggal di wilayah yang sama. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas anggotanya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing (Rahmatullah,dkk : 2014).

Gambaran umum P2FM pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kesempatan pada kelompok masyarakat miskin untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka memilih jenis kegiatan yang sesuai dengan kondisi bagi masyarakat miskin, melaksanakan kelompok usaha bersama, dan melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penuntasan kemiskinan diperlukan kebersamaan dari seluruh instansi terkait sehingga kebijakan ini mampu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dalam bentuk usaha yang menyeluruh dan saling bersinergi.

Keberadaan program pemberdayaan fakir miskin melalui Bantuan Langsung pemberdayaan Sosial memberikan peluang pada daerah untuk meningkatkan fungsi KUBE-FM dalam upaya penuntasan kemiskinan. BLPS dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Makassar. Salah satu KUBE yang menerima BLPS adalah KUBE-FM di Kecamatan Tallo Kota Makassar. Pada tahun 2015 Kota Makassar menerima bantuan Kelompok Usaha Bersama sebanyak 20 kelompok yang tersebar di berbagai kecamatan. 40% Kelompok Usaha Bersama terdapat di Kecamatan Tallo Kota Makassar.

Implementasi Program KUBE-FM tidak hanya melibatkan Dinas Sosial sebagai instansi yang menangani masalah sosial, akan tetapi juga melibatkan para pemangku kepentingan, sehingga program yang dicanangkan akan berhasil karena terjalin koordinasi dan sinergitas antar para pemangku kepentingan.

Program Pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan akan berjalan efektif dan efisien diperlukan sinergitas atau keterpaduan antara para pemangku kepentingan. Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kecamatan Tallo Kota Makassar tentu mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini akan berpengaruh terhadap efektivitas program KUBE-FM tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kecamatan Tallo Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas proses sosialisasi program KUBE-FM di Kecamatan Tallo Kota Makassar?
2. Bagaimanakah efektivitas proses pelaksanaanprogram KUBE-FM di Kecamatan Tallo Kota Makassar?
3. Bagaimanakah efektivitas proses monitoring dan evaluasi program KUBE-FM di Kecamatan Tallo Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Secara spesifik tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Proses Sosialisasi Program KUBE-FM di Kecamatan Tallo Kota Makassar.
2. Untuk Mengetahui Efektivitas Proses Pelaksanaan Program KUBE-FM di Kecamatan Tallo Kota Makassar.
3. Untuk Mengetahui Efektivitas Proses Monitoring dan Evaluasi Program KUBE-FM di Kecamatan Tallo Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai efektivitas pelaksanaan program kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM) di Kecamatan Tallo Kota Makassar.

2. Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Makassar agar lebih maksimal dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Efektifitas

1. Pengertian Efektivitas

Jika ditinjau dari berbagai referensi atau berbagai literatur, pengertian efektivitas memiliki banyak kesamaan pandangan dan versi yang dikemukakan oleh berbagai pakar. Efektivitas merupakan unsur yang paling dalam pelaksanaan program untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikatakan efektif apabila tujuan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai dengan baik. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yakni *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu hal yang dilakukan berhasil dengan baik. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian efektivitas:

Menurut Siagian yang dalam Indrawijaya (2010 : 175), memberikan pengertian tentang efektivitas yaitu penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini suatu pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak dilihat bagaimana melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hasibuan (2008 : 75), melihat efektivitas dari prestasi kerja bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang didasarkan atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Lebih jelas bahwa kecakapan, usaha dan kesempatan dapat memberikan hasil kerja yang disebut dengan efektif. Hasibuan menyatakan bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran yang eksplisit dan implisit. Pernyataan

tersebut cenderung mengandung efektivitas dalam tingkat efisiensi (Indrawijaya, 2010 :176).

Menurut Robbins dalam Indrawijaya(2010 : 175), bahwa efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan mencerminkan kontribusi strategis, minat mengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi. Lebih lanjut menurut Saxena dalam Indrawijaya(2010 : 176), mengemukakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah tercapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya orientasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas.

Peter F. Drucker dalam Moenir(2000 : 166), mengemukakan bahwa efektivitas, pada sisi lain menjadi kemampuan untuk memilih sasaran sesuai dengan hasil. Sedangkan Georgepoulos dan Tannenbaum yang dikutip oleh Indrawijaya(2010 : 188) mendefinisikan efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tapi juga bagaimana mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran.

Dari beberapa pendapat para ahli yang kita ketahui, bahwa konsep efektivitas adalah suatu konsep yang sifatnya multidimensional. Mendefinisikan

efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki, meskipun tujuan dari efektivitas adalah mencapai tujuan.

2. Ukuran Efektivitas

Ada beberapa jenis pendekatan yang dikemukakan oleh beberapa ahli untuk membahas efektivitas suatu organisasi atau program. Pendekatan-pendekatan penting dikemukakan untuk digunakan sebagai dasar pengukuran efektivitas.

Secara eksplisit, Robbin yang dikutip Indrawijaya (2010 : 177), mengemukakan empat pendekatan dalam memandang efektivitas suatu organisasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Pendekatan pencapaian tujuan (*goals attainment approach*). Pendekatan yang memandang bahwa keefektifan suatu organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan (*ends*), keseimbangan caranya (*means*). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, pencapaian tujuan yang berhasil menjadi sebuah tujuan yang tepat tentang efektivitas.
- b. Pendekatan sistem (*system approach*). Pendekatan sistem yang mengasumsikan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktural organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan dari organisasi.

- c. Pendekatan konstituensi-strategi (*stratific-constituencies approach*). Pendekatan ini memandang pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu di dalam lingkungan yang dari orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidup suatu organisasi.
- d. Pendekatan yang nilai-nilai yang bersaing (*competing value approach*). Pendekatan ini adalah gabungan dari keriga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup dimana organisasi itu berada.

Menurut Emitai Etzioni yang dikutip oleh Indrawijaya (2010 : 187), mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang di sebut SYSTEM MODEL yang terdiri dari empat kriteria, yaitu adabtasi, integrasi, motivasi dan produksi.

a. Adaptasi

Adaptasi mempersoalkan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oleh karena itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja serta ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut.

b. Integrasi

Integrasiyaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

c. Motivasi

Integrasi yaitu pengukuran mengenai keterikatan dan hubungan antara perilaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi

d. Produksi

Produksi yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

Pandangan Georgepoulus dan Tannenbaum dalam Indrawijaya (2010 : 187-188), menyatakan bahwa suatu pendekatan yang dapat lebih dipertanggung jawabkan, sebagaimana yang diajukan oleh para peneliti, adalah suatu cara pengukuran efektivitas yang mempergunakan beberapa unsur yang biasa terdapat dalam kehidupan organisasi yang berhasil. Hasil studi menunjukkan adanya penggunaan 3 unsur, yaitu produktivitas (efisiensi dalam arti ekonomi), tekanan strees (dibuktikan dengan tingkat ketegangan dan konflik), dan fleksibilitas (atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan intern dan ekstrn). Stees mengemukakan kriteria pengukuran efektivitas dalam Tangkilisan (2005 : 141) yaitu :

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi kerja
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan berlaba
- e. Pencarian sumber daya

Steers juga mengembangkan model suatu proses untuk menilai efektivitas organisasi, yang mencakup tiga sudut pandangan. Unsur atau dimensi yang pertama ialah optimasi tujuan yang akan dicapai, yaitu apabila beberapa bagian dari tujuan itu mendapat perhatian atau alokasi sumber dana dan daya yang lebih besar. Yang kedua yaitu berkaitan dengan interaksi antara organisasi dengan keadaan sekeliling. Selanjutnya ialah penekanan pada aspek perilaku yang telah memusatkan perhatian pada pentingnya peranan perilaku manusia dalam proses pencapaian tujuan organisasi dan dalam aktivitas suatu organisasi. Berdasarkan pembahasan mengenai pandangan dan penilaian efektivitas organisasi tersebut, kita dapat mengetahui beberapa hal :

- a. Menentukan efektivitas organisasi hanya menurut tingkat prestasi suatu pandangan yang terlalu menyederhanakan hakikat penilaian efektivitas organisasi. Kita mengetahui bahwa tiap organisasi mempunyai beberapa sasaran dan diantaranya sering terdapat persaingan. Persoalannya adalah bagaimana cara mengembangkan suatu rangkaian atau kumpulan sasaran yang dapat dicapai dengan batasan sarana, sumber daya dan dana yang tersedia.
- b. Tidak semua kriteria sekaligus dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi. Keinginan untuk meningkatkan keuntungan, umpamanya, dapat menyebabkan seseorang terlalu optimis dalam hal potensi pemasaran
- c. Pengukuran efektivitas organisasi sesungguhnya harus mencakup berbagai kriteria, seperti : efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi.

Ukuran efektivitas menurut David Krech dkk, dalam Danim (2004 : 119) adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
- b. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- c. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menambahkan kreativitas dan kemampuan.
- d. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketiaan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Menurut Martani dan Lubis (1987:55), ada 3 (tiga) pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu:

- a. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi;
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

B. Konsep Sosialisasi, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses belajar-mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat.

Menurut Mead (1863-1931).dalam bukunya sosialisasi pemerintahan:“Sosialisasi merupakan proses dimana manusia belajar melalui cara,nilai dan menyesuaikan tindakan dengan masyarakat dan budaya,ianya melihat bagaimana manusia meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka agar sesuai dengan keadaan, nilai, norma danbudaya sebuah masyarakat tersebut yang berlakudisekelilingnya.melalui, merasi,(*feeling*) dan percaya diri sendiri danproses sosialisasi dibudayakan sepanjang hayat”.

Sesuai dengan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulanbahwa pengertian sosialisasi yaitu proses dimana manusia belajar melaluicara,nilai dan menyesuaikan tindakan dengan masyarakat dan budaya,ianyamelihat bagaimana manusia meningkatkan pertumbuhan pribadi merekaagar sesuai dengan

keadaan, nilai, norma dan budaya sebuah masyarakat tersebut yang berlaku di sekelilingnya melalui, merasi, (*feeling*) dan percaya diri dari proses sosialisasi dibudayakan sepanjang hayat. Sosialisasi perlu diberi ke atas individu-individu dan tingkah lakunya dimana setiap individu memegang peranan yang berbeda dalam sebuah masyarakat atau kelompok. Mead, berpandangan bahwa individu tersebut merupakan sebagian dari pada yang telah membantu menciptakan lingkungan tersebut. Beliau menentang pandangan bahwa perilaku individu adalah dipengaruhi oleh lingkungan sosial, walaupun kita memang perlu hidup bermasyarakat dan berkelompok, tetapi kita tidak semestinya mengikuti tingkah laku masyarakat/kelompok tersebut.

Menurut Berger (2003:39) dalam bukunya yang berjudul “sosialisasi dalam kebijakan pemerintahan” mengemukakan pendapatnya mengenai sosialisasi sebagai berikut: “Sosialisasi adalah suatu proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat”. Pengertian sosialisasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa sosialisasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, dan proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam partisipasi masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan

sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman. (2002:70).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermula pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi

tersebut. Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

3. Monitoring dan Evaluasi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (dalam IPDN, 2011), disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Monitoring dilaksanakan dengan maksud agar proyek dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan menyediakan umpan balik bagi pengelola proyek pada setiap tingkatan. Umpan balik ini memungkinkan pemimpin proyek menyempurnakan rencana operasional proyek dan mengambil tindakan korektif tepat pada waktunya jika terjadi masalah dan hambatan (Deptan, 1989).

Menurut Hogwood and Gunn (1989) Monitoring adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya (*outcomes*). William N. Dunn (1994), menjelaskan bahwa monitoring mempunyai beberapa tujuan, sebagai berikut.

a. Compliance (kesesuaian/kepatuhan)

Menentukan apakah implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditentukan

b. Auditing (pemeriksaan)

Menentukan apakah sumber-sumber/pelayanan kepada kelompok sasaran (targetgroups) memang benar-benar sampai kepada mereka.

c. Accounting (Akuntansi)

Menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah implementasi sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.

d. Explanation (Penjelasan)

Menjelaskan mengenai hasil-hasil kebijakan publik berbeda dengan tujuan kebijakan publik.

Monitoring berkaitan erat dengan evaluasi, karena evaluasi memerlukan hasil dari monitoring yang digunakan dalam melihat kontribusi program yang berjalan untuk dievaluasi.

Pengertian evaluasi menurut Hornby dan Parnwell dalam Mardikanto, (2009) adalah sebagai suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu objek, keadaan, peristiwa atau kegiatan tertentu yang sedang diamati. Pengertian tersebut juga dikemukakan oleh Soumelis (1983) yang mengartikan evaluasi sebagai proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadap suatu obyek. Diartikan oleh Seepersad dan Henderson (1984) mengartikan evaluasi sebagai kegiatan sistematis yang dimaksudkan untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap sesuatu obyek berdasarkan pedoman yang telah ada.

Dikembangkan oleh Sutjipta (2009), ada lima ciri dalam evaluasi meliputi

1. kualitas: apakah program baik atau tidak baik, kualitas isi program, kegiatan

pendidik, media yang digunakan, penampilan pelaksana program,

2. kesesuaian(suitability): pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Program tidak menyulitkan atau membebani masyarakat, sesuai dengan tingkat teknis, sosial dan ekonomis masyarakat,

3. keefektifan: seberapa jauh tujuan tercapai,

4. efisiensi: penggunaan sumber daya dengan baik, dan

5. kegunaan (*importance*): kegunaan bagi masyarakat yang ikut terlibat dalam program.

C. Konsep Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk lebih memahami mengenai pengertian program, berikut ini akan dikemukakan definisi oleh beberapa ahli: Pariata (1989 : 236) mengatakan bahwa Program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya.

Menurut Sindhunata, mengatakan bahwa: Program adalah kelompok pernyataan yang persis dan berurutan yang gunanya untuk memberi tahu bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan. Sondang.P. Siagian,(2006:117) mengemukakan bahwa: Perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan. Dengan penjabaran yang tepat terlihat dengan jelas paling sedikit lima hal, yaitu:

1. Berbagai sasaran konkrit yang ingin dicapai.
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
3. besarnya biaya yang diperlukan beserta identifikasi sumbernya.
4. jenis-jenis kegiatan operasional yang akan di laksanakan
5. tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari sudut kualifikasinya maupun ditinjau dari segi jumlahnya.

Suatu program yang baik menurut Tjokroamidjojo (1984 :181) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungankeuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
5. Hubungan dalam kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya.
6. Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan demikiandalam menentukan suatu program harus di rumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat. Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa program adalah perincian suatu rencana

D. Konsep Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin(KUBE-FM)

Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) merupakan salah satu media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga masyarakat/ keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Dimensi sosial dan ekonomi menjadi pilar inti dari kegiatan KUBE. Secara sosial, KUBE menjadi wadah bergabungnya warga masyarakat/ keluarga miskin, sehingga memungkinkan mereka melakukan interaksi sosial yang positif dan demokratis. Melalui KUBE warga masyarakat/ keluarga miskin dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah-masalah personal dan kelompok secara timbal balik, yang pada akhirnya meningkatkan martabat kemanusiaan mereka. Secara ekonomi, kegiatan usaha yang dilakukan dalam kelompok, member kekuatan untuk menghimpun kekuatan modal, kemampuan bersaing, membangun jejaring, membuka peluang mengakses sumber-sumber dan menciptakan kegiatan ekonomi produktif yang demokratis. (Kemensos RI, 2011).

Secara operasional usaha, program KUBE-FM dilaksanakan secara kelompok dengan jumlah anggota kurang lebih 5-10 anggota. Program KUBE-FM dibentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial dan kesejahteraannya. Melalui program KUBE-FM, mereka dapat dibantu untuk memulai usaha sebagai langkah awal untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perbaikan ekonomi ke arah yang lebih baik. KUBE bagi fakir miskin merupakan sarana untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (khususnya dalam

peningkatan pendapatan), memotivasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, serta memperkuat budayakewirausahaan. Kegiatan usaha diberikan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha dan sarana prasarana ekonomi.

Tujuan program secara umum adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan potensi serta sumber kesejahteraan sosial bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Secara khusus program ini bertujuan :

1. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin
2. Mewujudkan kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga miskin
3. Meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dandunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah masalah kemiskinan
6. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin. Sasaran program ini adalah keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber pencaharian atau memiliki mata pencaharian tetapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih, kesehatan dan pendidikan).

Dikutip dalam Jurnal Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan oleh Arja Sadjarto, disebutkan bahwa tujuan pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya, yang dilaksanakan dengan pembentukan departemen atau dinas yang melaksanakan program. Adapun dinas terkait yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab program KUBE-FM adalah Dinas Sosial di setiap daerah. Kriteria yang menjadi kelompok sasaran program adalah kepala keluarga atau anggota keluarga yang mewakili keluarga fakir miskin, memiliki identitas kependudukan, berniat usaha, usia produktif dan memiliki keterampilan, mampu bertanggung jawab sendiri, serta bersedia mematuhi aturan KUBE-FM (Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin).

a. Landasan Hukum Pelaksanaan KUBE-FM

Landasan hukum pelaksanaan program bantuan sosial fakir miskin melalui program KUBE-FM yang dijelaskan oleh Kementerian Sosial melalui buku Pedoman KUBE (2011:4), meliputi: Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 (ayat 2), 28 huruf H ayat 3, pasal 33, pasal 34 ayat 1 dan 2. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin bahwa masalah fakir miskin adalah merupakan masalah nasional yang harus ditanggulangi secara terus menerus dan bertahap, bahwa salah

satu usaha untuk menanggulangi fakir miskin adalah dengan memberikan pelayanan, dan adapun Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin adalah setiap upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, membina, dan mengembangkan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat. Keputusan bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Menteri Sosial No. 05/SKB/M/V/1999 tentang 45/HUK/1999 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama melalui Pembentukan Koperasi pemberian bantuan yang dilakukan pemerintah dengan pengajuan data keluarga miskin yang perlu mendapatkan bantuan melalui RT/RW yang bersangkutan dalam rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) kecamatan tiap-tiap desa/kelurahan keputusan bersama Menteri Sosial. Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 tentang penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Menteri Agama Nomor 293/2002 40/PEGHUK/2002 tentang Pendayagunaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Fakir Miskin dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama.

b. Kelembagaan KUBE-FM

Mengenai kelembagaan KUBE telah dijelaskan oleh Kementerian sosial melalui buku pedoman KUBE (2011:17), terkait pembentukan KUBE didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Kedekatan tempat tinggal
2. Jenis usaha dan keterampilan anggota
3. Ketersediaan sumber sosial dan ekonomi
4. Kemampuan menyesuaikan diri dalam kelompok
5. Kesamaan motivasi
6. Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah tumbuh berkembang sebelumnya.

Lebih lanjut mengenai pembentukan dan manajemen KUBE-FM, kelembagaan KUBE-FM ditandai dengan:

1. Kepengurusan KUBE-FM Pada hakekatnya KUBE-FM dibentuk dari, oleh dan untuk anggota kelompok. Jumlah anggota KUBE-FM yaitu diawali oleh pembentukan kelompok-kelompok yang terdiri dari 5-10 orang. Satu kelompok KUBE-FM dapat memilih anggotanya yang bukan termasuk kategori fakir miskin (*poorest*), namun masih termasuk kategori miskin (*poor*) atau hampir miskin (*near poor*) dan mempunyai kemampuan serta potensi;
2. Kepengurusan KUBE-FM terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara. Pengurus KUBE-FM dipilih dari anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung pengembangan KUBE-FM, memiliki kualitas seperti kesediaan mengabdikan, rasa keterpanggilan, mampu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, mempunyai keuletan, pengetahuan

dan pengalaman yang cukup serta yang penting adalah merupakan hasil pilihan dari anggotanya.

3. Keanggotaan KUBE-FM Anggota KUBE-FM adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai sasaran program yang telah disiapkan. Jumlah anggota untuk setiap KUBE-FM berkisar antara 5 sampai 10 orang / KK sesuai dengan jenis PMKS.
4. Khusus untuk Pembinaan Masyarakat Terasing dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh pembentukan KUBE-FM berdasarkan unit pemukiman sosial, artinya suatu unit pemukiman sosial adalah satu KUBE-FM.
5. Ikatan pemersatu, yaitu kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber, latar belakang kehidupan budaya, memiliki motivasi yang sama, keberadaan kelompok masyarakat yang sudah tumbuh berkembang lama;
6. Administrasi KUBE-FM Untuk dapat berjalan dan berkembangnya KUBE-FM dengan baik, maka pengurus atau pengelola KUBE-FM perlu memiliki catatan atau administrasi yang baik, yang mengatur keanggotaan, organisasi, kegiatan, keuangan, pembukuan dan lain sebagainya. Adapun catatan dan administrasi KUBE-FM meliputi antara lain buku anggota, buku peraturan KUBE-FM, pembukuan keuangan / pengelolaan hasil, daftar pengurus dan sebagainya. (Depsos RI, 2005)

c. Kategori Perkembangan KUBE-FM

Kategori perkembangan KUBE didasarkan pada penilaian terhadap sejumlah indikator yang mencakup bidang kelembagaan, sosial, dan ekonomi yaitu:

1. Bidang Kelembagaan

- a. Jumlah anggota KUBE
- b. Kinerja Organisasi sesuai struktur dan pembagian tugasnya
- c. Pengadministrasian kegiatan seperti buku daftar anggota kelompok, buku tamu, buku kegiatan, buku kas/ keuangan, buku inventaris, buku simpan pinjam dan lainnya

2. Bidang Sosial

- a. Kuantitas dan kualitas pertemuan anggota
- b. Besarnya dan pemanfaatan Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS)
- c. Tingkat kesetiakawanan sosial anggota
- d. Tingkat partisipasi sosial anggota dalam UKS

3. Bidang Ekonomi

- a. Kuantitas dan kualitas pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif
- b. Optimalisasi/ kreatifitas pendayagunaan potensi dan sumber-sumber ekonomi
- c. Besarnya kontribusi terhadap penumbuhkembangan LKM/ Baitumal atau koperasi
- d. Jaringan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang dapat mempercepat keberhasilan KUBE
- e. Transparansi dan akuntabilitas .

Berdasarkan pedoman KUBE dari kementerian sosial (2011:31) yang menjelaskan tentang Pengelolaan KUBE memiliki beberapa tahapan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan KUBE, yaitu:

1. Tahap Persiapan, kegiatan pada persiapan terdiri dari:
 - a. Pemetaan sosial khususnya yang terkait dengan kemiskinan
 - b. Orientasi dan observasi
 - c. Registrasi dan identifikasi
 - d. Perencanaan program pelaksanaan
 - e. Bimbingan pengenalan masalah, bimbingan motivasi, dan evaluasi persiapan (oleh aparat desa/kelurahan, petugas pendamping, Pembina fungsional)
2. Tahap Pelaksanaan, kegiatan pada tahap ini meliputi:
 - a. Sosialisasi program kepada masyarakat
 - b. Seleksi dan pembentukan kelompok (Kelompok sasaran)
 - c. Bantuan Stimulan/ bantuan anggaran
 - d. Penyaluran bantuan modal usaha
 - e. Pelatihan keterampilan usaha/ kerja bagi anggota KUBE
 - f. Pendampingan dan monitoring
3. Tahap pengembangan usaha, kegiatannya meliputi:
 - a. Bimbingan sosial
 - b. Bimbingan pengembangan usaha dan perluasan jaringan
 - c. Pemberian bantuan pengembangan usaha
 - d. Pendampingan
 - e. Monitoring
 - f. Evaluasi
4. Tahap kemitraan usaha, kegiatan pada tahap ini meliputi:

- a. Inventarisasi sumber-sumber yang ada (sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, dan sumber daya manusia)
 - b. Membuat kesepakatan-kesepakatan
 - c. Pelaksanaan kemitraan usaha
 - d. Bimbingan kemitraan usaha
 - e. Perluasan jaringan kemitraan usaha dalam rangka memperluas pemasaran serta mengakses permodalan
 - f. Monitoring
 - g. Evaluasi
5. Tahap terminasi, dilakukan sebagai tahap pengakhiran pemberdayaan dengan ketentuan:
- a. KUBE sudah mandiri
 - b. Kegiatan KUBE menyalahi aturan
 - c. Kegiatan KUBE berhenti (kelompok bubar)

E. Kerangka Pikir

kelompok usaha bersama di dalamnya meliputi komponen program/kegiatan. Indikator yang perlu diperhatikan Dinas Sosial agar dapat mencapai keefektifan pelaksanaan program ini meliputi proses sosialisasi program, kelompok sasaran, bantuan dana/anggaran, penyaluran bantuan modal usaha, penyuluhan keterampilan berusaha, pendampingan. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari manajemen program yang dilaksanakan sebagai upaya pengendalian, agar proses dan hasil dari pelaksanaan program tercapai sesuai rencana. (sumber : Pedoman KUBE Kementerian Sosial RI tahun 2011)

Berikut bagan kerangka pikir digambarkan dibawah ini untuk menjelaskan uraian diatas:

BAGAN KERANGKA PIKIR

Efektivitas Pelaksanaan Program
KUBE-FM di Kecamatan Tallo
Kota Makassar

1. Proses Sosialisasi Program
2. Proses Pelaksanaan Program
3. Proses Monitoring dan Evaluasi Program

Tercapainya Tujuan Program
KUBE-FM di Kecamatan Tallo
Kota Makassar

Gambar 1. Kerangka Pikir

F.Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemecahan masalah agar peneliti mudah mendapatkan data dan penelitian biasa terarah dengan baik. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada mekanisme pelaksanaan program kelompok usaha bersama fakir miskin. Agar tercapai efektivitas pelaksanaan program kelompok usaha bersama fakir miskin di Kecamatan Tallo Kota Makassar maka perlu diperhatikan beberapa indikator yaitu (1) Proses Sosialisasi Program, (2) Proses Pelaksanaan Program, (3) Monitoring dan Evaluasi.

G.Deskripsi Penelitian

1. Pada tahap awal program, meliputi kegiatan sosialisasi. sosialisasi program kepada masyarakat dikatakan efektif dan optimal apabila dilaksanakan sesering

mungkin dan disampaikan melalui media yang bervariasi antara lain penyampaian langsung kepada masyarakat,

2. Tahap Pelaksanaan merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai sejak proses pencairan dana, pembelanjaan dana, pengelolaan kegiatan UEP secara bersama-sama dalam kelompok sampai pada pengelolaan hasil usaha dan pengembangan usaha.
3. Monitoring dan evaluasi (moneva) merupakan bagian darimenajemen program yang dilaksanakan sebagaai upayapengendalian, agar proses dan hasil dari pelaksanaan Program KUBE tercapai sesuai rencana



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berlokasi Kota Makassar tepatnya di Kecamatan Tallo Kota Makassar, dan di Dinas Sosial Kota Makassar, Lokasi ini diambil karena di Kecamatan Tallo Kota Makassar diterapkan program Kelompok Usaha Bersama Fakir miskin (KUBE-FM).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu sebagai objek yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi yang menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Penelitian kualitatif dilakukan terhadap variabel tunggal yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain .

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus dengan di dukung data kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta tertentu dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan dan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini akan dilaksanakan agar mendapatkan gambaran secara objektif.

C. Sumber Data

Selain itu dalam penelitian ini diperoleh pula sumber data yang terdiri atas dua bagian yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sejumlah informan penelitian melalui tahap wawancara.
2. Data sekunder yaitu data yang berupa catatan-catatan dari dokumen yang ada di kantor Dinas Sosial merupakan instansi terkait program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di kecamatan Tallo di Kota Makassar.

D. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian maka diperlukan teknik penentuan informan. Adapun teknik yang digunakan yaitu teknik purposive. Adapun informan yang dimaksud adalah:

Tabel 3.1 : Nama Informan

NO	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Ket
1	Burhanuddin Ghalib, SE.MM	BHG	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	L
2	Arif	ARF	Staff Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin	L
3	Suri	SRI	TKSK Kecamatan Tallo	P
4	Mahmud	MMD	Pembina KUBE Chabel Cell	L
5	Muh. Adam	ADM	Ketua Kelompok Billbon Print	L
6	Mahfud LU	MLU	Ketua Kelompok Reli	L
7	Sariama	SRM	Ketua Kelompok Abadi	P
8	Lili Evendi	LED	Sekretaris Kelompok Nusa Indah V	P
9	DG. Ngasih	DGN	Ketua Kelompok Mawar	P
10	Dra. Asniwati	ANT	Ketua Kelompok Mujur	p

11	Surya	SRY	Ketua Kelompok RK Cakrawala	
----	-------	-----	--------------------------------	--

E. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penulisan ini untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa cara penelitian yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Adalah dengan cara mengkaji serta mempelajari data pendukung dari kepustakaan, referensi buku literatur dan bahan tulisan lainnya atau dengan cara mengumpulkan teori dan konsep dari perpustakaan berupa buku ilmiah dan dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini yang dipergunakan dengan berdasar pemikiran dan pembahasan.

2. Penelitian lapangan

Adalah cara pengumpulan data, informasi, bahan-bahan secara langsung kelapangan di lokasi penelitian. Adapun cara pengumpulan data di lapangan digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung keobjek atau tempat penelitian.
- b. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu teknik pengumpulan informasi dengan teknik bertanya yang bebas, tetapi berdasarkan suatu pedoman(sesuai dengan ruang lingkup penelitian) guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.Wawancara mendalam ini dengan mempergunakan pedoman wawancara tidak berstruktur dimaksudkan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai permasalahan yang diamati.

- c. dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan dokumentasi atau arsip kantor.

F. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (Emzir, 2010) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Model data (data display)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan : yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data juga dapat berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).

c. Penarikan/ verifikasi kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012 : 127) membagi triangulasi kedalam tiga macam yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada. Dengan kata lain triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas untuk pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak dan Kondisi Geografis

Makassar adalah dengan ibukotanya Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang disebut Ujung Pandang, berada pada $119^{\circ}24'17''38''$ Bujur Timur hingga $5^{\circ}8'6''19''$ Lintang Selatan yang bersebelahan dengan utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar membujur (datar) serta $3-15^{\circ}$ (bergelombang) dengan luas wilayah $175,77$ km persegi. Kondisi iklim kota Makassar berada pada tingkat sedang hingga tropis dengan suhu udara yang berkisar antara 26°C sampai 29°C .

Letak kota Makassar berada di sekitar pantai yang membentang sepanjang jalur barat dan utara yang dikenal sebagai "Waterfront City" di mana didalamnya terdapat beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang semuanya dapat bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan daerah daratan rendah yang memiliki ukuran antara $0-25$ meter dari permukaan laut. Hal inilah yang menyebabkan Kota Makassar sering mengalami banjir saat musim hujan, khususnya saat hujan turun bersamaan dengan pasangannya air laut.

Terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan yang terdapat dalam kota Makassar. Dari 15 kecamatan, ada tujuh diantaranya yang berdekatan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo,

Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Batas-batas Kota Makassar meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- b. sedangkan timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

2. Profil Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983.

Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi maupun di kabupaten/Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan dan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar, Nomor: 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 50 Makassar, Kelurahan Ujung pandang Baru, kecamatan Tallo Kota Makassar, berada pada tanah seluas 499m², dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat

3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Maka Visi Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebagai berikut :

•Pengendalian permasalahan sosial berbasis masyarakat tahun 2014

Maknanya adalah manusia membutuhkan kepercayaan diri yang dilandasi oleh nilai-nilai kultur lokal yang diarahkan kepada aspek tatanan kehidupan dan penghidupan untuk menciptakan kemandirian lokal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan kerja, ketentraman, kedamaian, dan keadilan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta mendorong tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam ikut melaksanakan proses pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.

•Misi Dinas Sosial Sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan kemitraan dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan sosial masyarakat

2. Memperkuat ketahanan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat yang rentan dan tidak beruntung
3. Mengembangkan sistem perlindungan sosial
4. Melakukan jaminan sosial
5. Pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal
6. Mengembangkan pemberdayaan sosial.

Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang berpartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (Struktural dan Fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan
3. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/ stakehoders khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan Orsos Serta pemerhati di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.

4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Kota Makassar, maka jabatan struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan
3. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
 - a. Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
 - b. Seksi Pembinaan Keluarga dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - c. Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
 - b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
 - c. Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan pemulung.
5. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
 - a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
 - b. Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial
 - c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial
6. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial
 - a. Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial
 - b. Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar
 - c. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas ini sebagai unsur pelaksana operasional dinas pada Dinas Sosial Kota Makassar

b. Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

Dinas Sosial Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai kebijakan walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada point 1, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- b. Perencanaan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- c. Pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- d. Pengendalian dan pengamanan teknis oprerasional di bidang usaha kesejahteraan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial serta bimbingan organisasi sosial
- e. Melakukan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pemberian, pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkup Dinas Sosial Kota Makassar.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.

c. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.

3. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, kegiatan dibidang penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), pembinaan karang taruna dan pelaksanaan penelitian/ pendataan PMKS dan PSKS.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial, dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, korban tindak kekerasan pekerja migran.

5. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Bidang pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pengendalian daerah rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan kepada masyarakat fakir miskin serta bantuan kepada korban bencana alam dan sosial serta pelayanan kepada orang terlantar.

6. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan terhadap organisasi sosial/LSM dan anak terlantar, pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah serta melaksanakan pembinaan dan pemahaman pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan.

Adapun Bidang Kewenangan Dinas Sosial

1. Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah kabupaten / kota dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Penyuluhan dan bimbingan sosial
3. Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan
4. Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar (dalam dan luar panti)

5. Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan anak dan adopsi lingkup kabupaten / kota
6. Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar panti)
7. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita cacat
8. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, gelandangan, pengemis, dan eks narapidana)
9. Pemberdayaan keluarga fakir miskin meliputi fakir miskin, komunitas adat terpencil dan wanita rawan sosial ekonomi
10. Pemberdayaan karang taruna / organisasi kepemudaan
11. Pemberdayaan organisasi sosial / LSM lingkup kabupaten / kota
12. Pemberdayaan tenaga kerja sosial masyarakat
13. Pemberdayaan dunia usaha(partisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial)
14. Pemberdayaan pengumpulan sumbangan sosial lingkup kabupaten/kota
15. Penanggulangan korban bencana alam lingkup kabupaten/kota
16. Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia)
17. Penanggulangan korban napza
18. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga
19. Pelayanan kesejahteraan angkatan kerja
20. Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota.
21. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota

22. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten / kota
23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

Adapun sasaran dari bidang Kewenangan tersebut adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meliputi :

1. Anak Balita Terlantar

Permasalahan pokok yang berkaitan dengan anak balita terlantar antara lain kondisi gizi yang buruk, keterbatasan jangkauan pelayanan sosial bagi anak balita, disamping itu semakin terbatasnya waktu kedua orang tua untuk memberikan perhatian penuh bagi keberlangsungan tumbuh kembangnya anak dalam lingkungan keluarganya.

2. Anak terlantar

Pelayanan sosial yang diberikan kepada anak terlantar yaitu pemberdayaan anak terlantar melalui pemberian bantuan usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama serta pemberian latihan keterampilan melalui panti sosial bina remaja.

3. Anak Nakal

Pelayanan sosial yang diberikan terhadap anak nakal yaitu melalui pembinaan dalam panti yang dilaksanakan di Panti Marsudi Putra Salodong.

4. Anank Jalanan

Pelayanan Sosial yang diberikan kepada anak jalanan berupa pemberian beasiswa bagi anak jalanan usia sekolah, pemberian latihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak jalanan serta pemberdayaan keluarga anak jalanan.

5. Penjaja seks Komersial (PSK)

Penanganan terhadap PSK yang terjaring melalui razia diberikan pembinaan melalui panti dan non panti. Pembinaan dalam panti berupa pemberian latihan keterampilan yang dilaksanakan di Panti Sosial karya wanita Mattiro Deceng. Sedangkan pembinaan luar panti melalui kegiatan pemberdayaan berupa pemberian latihan keterampilan.

6. Gelandangan Pengemis

Penanganan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengemis serta pemberdayaan pengemis beserta keluarganya melalui pemberian bantuan modal usaha.

7. Eks korban penyalahgunaan narkoba

Seseorang yang pernah menggunakan narkoba, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras di luar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

8. Anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan

Anak berusia 5-18 tahun, wanita yang berusia 18-59 tahun dan lanjut usia yang berusia 60 tahun keatas yang terancam secara fisik atau non fisik (psikologis) yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah satu atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.

9. Penyandang cacat

Pelayanan sosial yang diberikan bagi penyandang cacat adalah pemberian bantuan dana jaminan sosial bagi penyandang cacat berat melalui Departemen Sosial RI.

10. Eks Kusta

Eks kusta adalah seseorang yang pernah menderita penyakit kusta dan telah dinyatakan sembuh secara medis, tetapi mengalami hambatan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari karena dikucilkan keluarga atau masyarakat. Penanganan yang diberikan bagi eks kusta adalah pembedayaan keluarga eks kusta.

11. Eks Narapidana

Eks narapidana adalah seseorang yang telah selesai masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan kehidupannya secara normal.

12. Lanjut Usia terlantar

Penanganan terhadap lanjut usia terlantar yang masih produktif yaitu pemberdayaan lanjut usia melalui pemberian bantuan usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama. Selain itu ada juga pemberian bantuan pelayanan dan jaminan sosial lanjut usia terlantar yang berasal dari Departemen Sosial RI.

13. Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Wanita rawan sosial ekonomi adalah seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

14. Keluarga Fakir Miskin

Pelayanan sosial yang diberikan bagi keluarga fakir miskin yaitu pengembangan potensi keluarga fakir miskin, pemberian latihan keterampilan berusaha bagi keluarga fakir miskin, pendampingan UEP dan KUBE fakir miskin.

15. Keluarga berumah tidak layak huni

Pelayanan sosial yang diberikan adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni berupa pemberian bantuan bahan bangunan rumah seperti seng, balok kayu, tripleks dan papan.

16. Perintis Kemerdekaan

Perintis kemerdekaan adalah orang-orang yang telah berjuang mengantarkan Bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang diakui dan disahkan melalui kepmensos RI No.15/HUK/1996 sebagai perintis kemerdekaan. Di Kota Makassar Perintis Kemerdekaan ada 6 Orang.

17. Keluarga Pahlawan Nasional

Keluarga pahlawan nasional adalah suami atau isteri dan anak dari seorang pahlawan nasional yang ada di Kota Makassar berjumlah 3 orang.

18. Keluarga Veteran

Keluarga Veteran adalah suami atau isteri dan anak dari seorang yang telah menjadi anggota veteran berdasarkan surat keputusan dari Menteri pertahanan

dan keamanan RI. Jumlah keluarga veteran yang ada di kota Makassar yaitu 115 orang.

19. Korban Bencana Alam

Bantuan yang diberikan bagi korban bencana alam berupa dapur umum, apabila korban lebih dari 10 KK atau 75 jiwa dengan waktu 3 (tiga) hari atau bisa ditambah 2 (dua) hari menjadi 5 (lima) hari apabila keadaan betul-betul darurat, selain itu ada bantuan permakanan dan tenda.

20. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

Keluarga bermasalah sosial psikologis yang tercatat pada Dinas Sosial yaitu 19 KK.

21. Masyarakat yang tinggal di Daerah Rawan Bencana

Wilayah yang paling rawan bencana di Kota Makassar yaitu kecamatan ujung tanah, karena selain berpendudukan padat juga berlokasi di pesisir pantai.

22. Korban Tindak Kekerasan

Keluarga maupun kelompok yang mengalami tindak kekerasan baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, pemaksaan, diskriminasi, dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berbeda dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga mengakibatkan penderitaan atau fungsi sosialnya terganggu.

23. Pekerja Migran

Seseorang yang bekerja diluar tempat asalnya menetap sementara ditempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar. Pelayanan sosial yang diberikan yaitu pemberdayaan bagi pekerja migran.

Adapun sasaran dari Bidang pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan sosial tersebut adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terkhusus sesuai dengan fokus penelitian penulis meliputi :

- Pelayanan sosial yang diberikan bagi keluarga fakir miskin yaitu pengembangan potensi keluarga fakir miskin, pemberian latihan keterampilan berusaha bagi keluarga fakir miskin, pendampingan UEP dan KUBE fakir miskin.

B. Efektivitas Proses Sosialisasi Program KUBE-FM di Kecamatan Tallo Kota Makassar

Sosialisasi adalah hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan suatu program. Demikian halnya dengan program KUBE pada Dinas Sosial Kota Makassar yang tentunya akan terlaksana secara efektif apabila komunikasi antara pihak-pihak yang terkait berjalan dengan baik.

Sosialisasi dengan baik antara pihak Dinas Sosial selaku pelaksana program dengan masyarakat selaku sasaran utama dari program KUBE menjadi hal yang mutlak diperlukan demi tercapainya keefektifan pelaksanaan program KUBE. Bentuk sosialisasi disini tentunya dapat diinterpretasikan melalui program kepada masyarakat yang merupakan sasaran dari program yang bersangkutan untuk tercapainya target dari KUBE.

Sosialisasi menjadi kunci utama keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan. Melalui proses sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, suatu program akan dengan mudah mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat terjadi karena semakin

baik proses sosialisasi dari suatu program maka akan semakin baik pula pemahaman masyarakat akan konsep dan tujuan dari program tersebut.

Dengan begitu masyarakat akan semakin terdorong untuk mengakses informasi lebih jauh mengenai program ini serta ambil bagian dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Terkait proses sosialisasi program KUBE yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, setelah penulis melakukan penelusuran lewat hasil wawancara ditemukan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan menurut pemerintah telah maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial Burhanuddin Ghalib, SE. MM yang menyatakan bahwa :

Kalau Sosialisasi KUBE ke masyarakat cuman satu kali dilakukan pada saat bantuan KUBE akan di implementasikan turun di daerah Kabupaten/Kota termasuk Kota Makassar. Jadi Dinas Sosial mensosialisasikan kepada masyarakat pada saat ini mau diturunkan bantuan-bantuan, harusnya juga masyarakat lebih aktif dalam mencari informasi. “(Hasil Wawancara BHG, 29 Oktober 2018)”
Pernyataan diatas lebih diperjelas mengenai proses sosialisasi oleh Staff

Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin atas nama Arif yang menyatakan bahwa :

Setiap ada kebijakan atau hal yang akan dilaksanakan atau bantuan yang diturunkan langsung akan disampaikan ke masyarakatnya, kan Program Kube sudah banyak diketahui oleh masyarakat “(Hasil Wawancara ARF, 5 November 2018)”.

Untuk lebih memperjelas proses sosialisasi ini, penulis menggali informasi dari ketua kelompok billbon print Muh. Adam yang mendapatkan bantuan KUBE dari Dinas Sosial yang mengatakan bahwa :

Disini saya tergabung dalam lembaga, jika ada informasi dari dinas sosial atau dinas pendidikan pasti lembaga ini mengetahui informasi tersebut. jadi kemarin dapat informasi tentang kelompok usaha bersama makanya kita bentuklah kelompok usaha bersama itu bidang percetakan, dan kalau kube sebenarnya program nasional, jadi informasinya bisa didapatkan

dari mana saja, Kebanyakan masyarakat sudah mengetahui bahwa ada namanya program kube “(Hasil Wawancara ADM, 7 November 2018)”. Selanjutnya penulis mewawancarai sekretaris kelompok nusa indah v Lili

Evendi yang menyatakan bahwa :

Kalau saya dengar dari Ibu RT kalau Dinas Sosial mau turunkan bantuan kelompok, jadi Ibu yang ajak saya bergabung dalam kelompok begitu, bagus juga karena di modali baru dapat keuntungan disitu “(Hasil Wawancara LED, 16 Februari)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok billbon print dan sekretaris kelompok nusa indah v bahwa keberadaan program kelompok usaha bersama ini memang telah banyak diketahui oleh masyarakat, apalagi yang tergabung dalam LSM, Karang Taruna, dan lembaga yang lain sangat mudah mendapat informasi bahwa akan diadakan program Kube. Jadi tidak sulit masyarakat mendapatkan informasi tentang kube ini.

Dalam pelaksanaan proses sosialisasi ini tidak sepenuhnya berjalan maksimal karena ada hambatan yang dihadapi dilapangan sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Burhanuddin Ghalib, SE. MM bahwa:

Sebenarnya kalau sosialisasi bagi saya pribadi hambatan yang dialami karena kekurangan personil atau orang, sosialisasi juga dilakukan sangat minim dan juga mengandalkan tenaga kerja yang ada seperti TKSK masing-masing Kecamatan. Hambatan yang sering dihadapi oleh dinas sosial sendiri terdapat masalah pada SDMnya, namanya saja orang tidak mampu, namanya saja orang miskin untuk merubah pola pikir, budaya sebagai pekerja. Yang namanya orang miskin pasti disebabkan dari pendidikan yang kurang dan mungkin juga disebabkan karena kemalasan, dan ada beberapa juga yang saling mempengaruhi. yang kedua yang sering terjadi masalah adalah persoalan anggaran, karena kalau berbicara mengenai bantuan yang akan diturunkan khususnya di kota Makassar semua masyarakat ingin dikatakan miskin, ini saya katakan miskin jadi-jadian karena yang namanya bantuan semua orang mau, apalagi kalau orang yang boleh dibilang berkecukupan pasti mengatakan saya juga tidak mampu agar mendapatkan bantuan, sekali

lagi saya katakan karena yang namanya bantuan semua mau “(Hasil Wawancara BHG, 29 Oktober 2018)”.

Dengan melihat kondisi diatas maka proses sosialisasi dinilai belum berjalan maksimal sebab proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial sekali dalam setahun terhitung sejak program bantuan akan di laksanakan. Sosialisasi terbilang jarang dilakukan itupun informasi yang didapatkan salah satu penerima bantuan berasal dari mulut ke mulut. Sebelum program dijalankan pihak dari Dinas Sosial memang sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat namun tidak cukup sering. Hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial agar lebih masif lagi menyampaikan ke masyarakat miskin selaku sasaran dari Program Kube.

C. Ektivitas Proses Pelaksanaan Program KUBE-FM di Kecamatan Tallo Kota Makassar

Kata publik berarti membahas tentang cakupan negara atau pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dapat pula berarti : 1). Orang-orang, 2). Keseluruhan anggota suatu komunitas, bangsa atau masyarakat dan 3). Kumpulan individu dengan kepentingan yang sama(Abdi,2016).

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas serta fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha.Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk megarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi

kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan adalah dibentuknya KUBE. Berikut penjelasan terkait KUBE :

KUBE adalah Kelompok Usaha Bersama yaitu salah satu program pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial RI khususnya di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Menurut Kepala Bidang Pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial Burhanuddin Ghalib, SE. MM secara garis besar menyatakan bahwa:

KUBE ini Kelompok Usaha Bersama ini adalah program nasional, kebetulan dinas sosial ini diamanahkan perpanjangan tangan di daerah. Jadi kube itu memang suatu program kementerian sosial yang sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu di kota makassar, bukan hanya di kota makassar tapi seluruh indonesia sebenarnya ada bantuan namanya kelompok usaha bersama, namanya program nasional semua daerah di kabupaten/kota di indonesia menerima bantuan-bantuan itu. namun khusus di kota makassar ini semuanya sejak lama menerima bantuan-bantuan itu dan cukup sudah terlaksana “(Hasil Wawancara BHG, 29 Oktober 2018)”.

Terkait proses pelaksanaan KUBE maka menurut penulis ada beberapa indikator yang perlu dilihat dan dipahami yaitu kelompok sasaran, bantuan dana/anggaran, penyaluran bantuan modal usaha, penyuluhan keterampilan berusaha/pelatihan, pendampingan.

Program yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya mempunyai sasaran yang tepat karena ketepatan sasaran dalam menjalankan program sangat

berpengaruh pada keberhasilan sebuah program dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Sasaran yang ditentukan dari suatu program hendaknya sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Sama juga halnya program pemberdayaan masyarakat yang tergolong kurang mampu. Program Kube harusnya diberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan.

Berbicara mengenai penetapan sasaran program kube ini perlu kiranya untuk mengetahui sebelumnya terkait bagaimana syarat dan tujuan dari kube tersebut sehingga jelas siapa yang menjadi sasaran Program KUBE terkhusus di Kecamatan Tallo. Hal ini tercantum pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama Adapun syarat dan tujuannya sebagai berikut,

Anggota KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga
- b. berdomisili tetap dan memiliki identitas diri
- c. telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif
- d. memiliki potensi dan keterampilan dan
- e. memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/nama lain yang sejenis atau pemegang kartu penerima bantuan sosial

Setelah melihat penjelasan di atas maka penulis melakukan wawancara Kepala Bidang Pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial

Burhanuddin Ghalib, SE. MM mengenai syarat menjadi anggota KUBE, beliau mengatakan bahwa:

Itu kalau kumpulnya memang dari awalnya TKSK yang memberi seleksi dan penyaringan dari bawah itu masyarakat tadi itu membuat suatu proposal. Didalam proposal itu sudah ada rincian-rincian yang berhubungan dengan usaha yang mau dikembangkan. Jadi ada semacam ketua, sekretaris memang sudah tergambar dalam proposal tadi itu sebelum diturunkan itu bantuan, itupun masih diseleksi, karena banyak juga yang mengajukan proposal karena kalau misalnya anggaran terbatas misalnya yang kita mau bantu Cuma 20 kelompok selebihnya itu kita seleksi kalau misalnya proposalnya banyak yah kita seleksi lewat tksk itu (Hasil Wawancara BHG, 29 Oktober 2018)".

Setelah melihat penjelasan Kepala Bidang Pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial diatas, dapat disimpulkan bahwa TKSK berperan penting dalam hal penyeleksian melalui kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan menurut kepala bidang BJKS penyeleksian lebih dimaksimalkan jika yang mengajukan proposal tersebut berjumlah banyak namun anggaran yang disediakan terbatas.

Untuk lebih lanjut penulis menggali informasi untuk mengetahui secara luas dan terang untuk menentukan kriteria maupun prosedur terkait KUBE melalui Staff Seksi pemberdayaan fakir miskin Arif yang mengatakan bahwa:

jadi begini kube sudah memang ada tahapannyamaksudnya sudah ada tahapan penyeleksian terhadap warga yang ingin mendapat bantuan, contoh kalau kita tentukan ini fakir miskin, contoh misalkan kalau kayak sekarang itu bagaimana caranya itu didata fakir miskin verifikasi validasi misalkan contoh bilik rumahnya bagaimana kita isi bilik rumahnya sekian, mcknya begini ruang tamunya begini, ruang tidurnya begini dapurnya begini itu semua komponen yang diseleksi disitu kementerian sosial yang tentukan masuk atau tidaknya kriteria tersebut, tapi orang-orang yang didata sebelumnya ini adalah orang yang diajukan oleh kelurahan karena kelurahan yang lebih mengetahui warganya, tim verifali itu menerima data orang-orang yang mau di verifikasi. Disitu komponen-komponen dia isi, yang mengambil keputusan ini pusat, jadi setelah tahapan itu kan ada keluar nama-nama fakir miskin itulah semua yang menerima bantuan "(Hasil Wawancara ARF, 5 November 2018)".

Dalam memberikan penjelasan diatas dapat diperjelas bahwa seleksi terhadap warga miskin terdapat kriteria-kriteria yang mengatakan bahwa mereka yang layak menerima bantuan tersebut. Cara meverifikasi dengan mendatangi dan melihat langsung kategori yang terbilang warga miskin, namun sebelumnya calon penerima bantuan yang diajukan oleh kelurahan. Setelah komponen memenuhi syarat tetap keputusan berasal dari pusat.

Selanjutnya perlu pula kita ketahui secara jelas dilapangan terkait KUBE melalui TKSK Kecamatan Tallo yang sebagai instrumen dalam jalannya program KUBE terkhusus di kecamatan Tallo, penulis mendapatkan informasi dari TKSK Kecamatan Tallo Suri bahwa:

Kita lihat dari jenis pekerjaannya, terus ada keterangan dari rt/rwnya yang menyatakan bahwa dia tidak mampu terus ada kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) mereka dibekali dengan kartu kis. Jadi harus ada surat keterangan tidak mampu (Hasil Wawancara SRI, 19 November 2018)".

Melihat penyampaian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan kriteria warga miskin terdapat banyak komponen didalamnya.

Setelah penulis mendapatkan informasi dari perangkat pelaksana maka penulis mencoba menelusuri apakah kriteria tersebut sesuai dengan prosedur/kriteria yang telah ditentukan sehingga penulis melakukan wawancara kepada kelompok Kube yaitu dari Pembina Chabel Cell Mahmud, menyatakan bahwa:

Itu juga tidak ada kriteria, yang terpenting disitu diatas 10 orang anggotanya dan punya komitmen usaha bersama artinya keahlian satu kalau misalnya service hp ini yang terlibat dalam Kube ini harus punya keahlian service, untuk mendapatkan bantuan juga agak sulit karena terbatas. jadi sebenarnya kalau persyaratan untuk dapatkan kube tidak susah juga yang penting dia berkelompok, memang terkadang itu kelompok kalau sebelum terbentuk cuman 6 orang karna kalau persyaratan 10 maka kita rekrut orang. Kemudian dia periksa, apakah memenuhi syarat. Contoh misalnya tempat usaha, layakkah, tempatnya terus sudah ada alat-alat, jangan sampai langsung mau diberikan semua dinas sosial yang hadirkan, misalnya menjahit didepan itu sudah memang mereka menjahit supaya dengan hadirnya kube itu manajemen berubah

karena sudah jelas pembagian insentivnya, itu saja perbedaan kemarin kalau orang sebelum mendapat bantuan kube langsung bagi rata saja, tidak ada istilah cadangan modal tidak ada usaha untuk mau berkembang jadi disitulah perbedaannya, setelah menerima bantuan kube mereka sadar akan pentingnya pengembangan diri potensi diri, kalau potensi dirikan diambil dari dana itu untuk pelatihan, kemarin kita berikan kursus itu di handayani. Makanya disepakati itu 15% cadangan modal 15% untuk peningkatan potensi kapasitas. Memang disitu pembagiannya disepakati, cuman dinas sosial tidak ada seperti itu, harusnya ini program kalau saya punya saran program ini turun ada istilahnya pengawalan, pendampingan. Tidak ada yang kita rasakan dulu, tapi katanya sekarang sudah ada sudah ada dilatih itu, kalau zaman saya tidak ada, untuk sekarang katanya ada, banyak yang dilatih itu untuk mendampingi kube-kube itu ada karena waktu kunjungan lapangan dia disini tapi zamannya saya belum “(Hasil Wawancara MMD, 7 November 2018)”.

Kemudian menurut Ketua BILLBON Print Muh. Adam menyatakan

bahwa:

Mengajukan proposal, kemudian sebagai masyarakat kan siapa saja bisa sebenarnya cuman kan ketersediaan program saja itu kebetulan biasa itu kalau masyarakat bermohon kelompok-kelompok remaja bermohon-bermohon pengembangan usaha saja nanti programnya itu namanya kube maka mengusulkanlah bahwa itu kelompok kube begitu ceritanya jadi kalau misalnya orang bermohon pembinaan di dinas tenaga kerja lain juga kan model kerjanya, model programnya, kegiatannya itulah kegiatan sablon. Kalau kube itu 10 orang yah. Yang jelas mau berusaha tidak punya kriteria khusus yang penting punya kemauan, keahlian, dan punya bakat dan minat khususnya dengan yang di kelompok itu, kelompok kube ada yang kalau disini kebetulan sablon toh yah mungkin ada eh mungkin karna sablon disini yang itu yang punya bakat dan minat di sablon cetak mencetak “(Hasil Wawancara ADM, 7 November 2018)”.

Melihat hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perangkat

pelaksana telah menjalankan standarisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Proses seleksi juga sangat ketat dengan beberapa persyaratan yang disebutkan diatas. Namun masyarakat yang terlibat dalam kelompok kube tidak mengetahui secara luas mengenai kriteria dan syarat menjadi anggota kelompok Kube, dalam hal ini penjelasan tentang prosedural juga penting disampaikan ke masyarakat yang akan terlibat dalam program ini sehingga kalangan masyarakat tidak

terdapat lagi kecemburuan sosial. Kube targetnya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang terbilang miskin.

Berangkat dari hal tersebut dapat dipahami bahwa terkait program kube ini ada prosedur dan kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat sehingga program ini diharap tepat sasaran. Berbicara ketepatan sasaran jika dilihat persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan sangat ketat dan memiliki kriteria dalam mengukur tingkat kemiskinan masyarakat. Penulis memahami bahwa kelompok sasaran dalam pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin dapat dikatakan tepat sasaran, dilihat dari kriteria serta prosedur yang telah ditetapkan pemerintah bahwa masyarakat penerima bantuan KUBE benar-benar telah memenuhi kriteria, syarat serta prosedur yang telah ditetapkan. Program ini selayaknya menjadi salah satu program yang sangat bermanfaat, mampu meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan edukasi dalam bentuk keahlian agar masyarakat miskin mampu mengangkat derajatnya.

Selanjutnya untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program KUBE ini maka indikator berikutnya adalah bantuan dana dan penyaluran bantuan modal usaha yang disediakan dan dikucurkan oleh pemerintah guna menjalankan program tersebut.

Menurut wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial Burhanuddin Ghalib, SE. MM tentang anggaran mengatakan bahwa :

Satu kelompok kube anggaran yang disediakan dari kementerian sekitaran 20 juta yang berasal dari APBN. Kalau di kota makassar itu diberikan sekitar 20 juta satu kelompok yang berisikan 10 orang. Di makassar ini ada beberapa kelompok-kelompok itu misalnya penjahitan atau konveksi

ada juga namanya pencucian mobil atau motor atau ada namanya juga bantuan service hp disitulah membentuk komunitas kelompok misalnya anda ini yang bisa saya panggil untuk kembangkan usaha itu orang-orang yang bisa membentuk satu kelompok jadi dia yang susun misalnya ketua dan sekretaris. Inilah yang berkolaborasi untuk membuat suatu tim pekerja untuk membantu kelompok dan diberikan bantuan-bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, contoh misalnya usaha konveksi dibelikan mesin jahit, dibelikan benang dan lain segala macam yang mendukung pekerjaan itu “(Hasil Wawancara BHG, 29 Oktober 2018)

Pernyataan Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan

Kesejahteraan Sosial kemudian dilanjutkan oleh Staff Seksi Pemberdayaan Fakir

Miskin Arif tentang jenis dan klasifikasi mengenai program KUBE ini terkait anggaran dengan mengatakan bahwa:

Ini kan kube memang dia jenisnya sama, jadi bukan di bilang kayak ada tidak kube bengkel ada tidak kube warkop, tidak ada, kube itu jenisnya sama, menjajakan memang. Misalnya hasil kerajinan atau contoh warga disitu bisa membuat seperti keripik ini contoh anunya contoh apa yang dia jajakan di kelompok usaha bersama begitu maksudnya adalah perputaran uang jadi tergantung kredibilitasnya, tapi anggaran dasarnya sama 20 Juta. “(Hasil Wawancara ARF, 5 November 2018)”.

Dari hasil wawancara kepada yang berwenang di instansi terkait maka berbicara Kube anggaran yang disediakan sama setiap jenis usaha. Jadi jenis usaha apapun dalam kube anggaran yang disediakan tetap sama jadi tidak ada perbedaan anggaran yang diberikan pada setiap kelompok. Selanjutnya untuk mencari tahu masalah terkait anggaran Kube tersebut maka penulis kemudian menggali informasi terhadap Pembina dari Kube Chabel Cell Mahmud yang menyatakan bahwa :

Anggaran yang diberikan dalam kelompok itu sama semua, karena ada juga anggaran yang diberikan dari APBN, ada APBN tapi semua dalam bentuk barang dari dinas, ada las ada tatarias itu dibantu dalam bentuk barang jadi anggarannya sebesar 20jt, kita terima dalam bentuk paket barang jadi dinas sosial yang belanja kan itu kita terima barang saja “(Hasil Wawancara MMD, 7 November 2018)”.

Melihat hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa besaran anggaran Kube yang disediakan Kementerian Sosial sebesar 20 juta dan penyaluran bantuan modal usaha Kelompok Kube yang diberikan ke kelompok itu dalam bentuk barang yang menjadi keperluan kelompok dalam menjalankan usahanya. Dari hasil wawancara tersebut dipahami bahwa salah satu indikator proses pelaksanaan program KUBE dalam hal ini anggaran dapat dikatakan cukup jelas.

Selanjutnya untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program KUBE ini maka indikator selanjutnya adalah penyuluhan keterampilan berusaha yang disediakan oleh pemerintah seperti pelatihan guna menjalankan program tersebut.

Menurut wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial Burhanuddin Ghalib, SE. MM tentang penyuluhan keterampilan yang disediakan oleh Dinas Sosial beliau mengatakan bahwa :

Kalau penyuluhan keterampilan tetap ada cuman istilahnya itu pemantapan untuk pengembangan usaha. Kegiatan itu sering juga dilaksanakan di hotel ada memang semacam itu pemantapan sebelum usaha ini di implementasikan ke lapangan “(Hasil Wawancara BHG, 29 Oktober 2018)”.

Pernyataan Kabid diatas diperkuat oleh TKSK Kecamatan Tallo Suri yang menyatakan bahwa:

sebelum turun bantuan itu kan mereka mengikuti bimtek, dan sepertinya 2 kali bimtek itu dilakukan, 2 kali dalam satu tahun. Tapi kalau sudah turun bantuannya itu sudah tidak ada lagi bimtek tinggal pengawasan saja “(Hasil Wawancara SRI, 19 November 2018)”.

Selanjutnya terkait penyuluhan keterampilan berusaha disampaikan oleh Staff Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Arif mengatakan bahwa:

Sebelum di jalankan ini program ada didatangkan orang untuk diberikan penyuluhan begitu tentang berwirausaha. Tapi kalau untuk selanjutnya setelah diberikan bantuan pintar-pintarnya Kube itu cari sistem sumber

untuk dia mau belajar membuat kerajinan manik-manik untuk dia jajakan di kubunya. Maksudnya jangan jempot bola “(Hasil wawancara ARF, 5 November 2018).

Dari hasil wawancara diatas dilakukan yang namanya penyuluhan keterampilan persiapan sebelum usaha dijalankan namun hanya dilakukan sekali sampai 2 kali. selanjutnya tidak ada lagi tahapan untuk mengembangkan usaha kedepannya.

Dari hasil pernyataan diatas penulis mencoba mewawancarai Pembina Kube Chabell Cell Mahmud terkait penyuluhan keterampilan berusaha yang mengatakan bahwa:

Iya ada penyuluhan keterampilan waktu sah mi jadi kelompok Kube. Diajari cara-caranya kelola ini usaha tapi sampai sebatas itu saja, tidak ada kelanjutannya, tidak ada juga pelatihan untuk usaha ini, kan kalau ada pelatihan terus-menerus untuk kembangkan usaha bagus juga jadi berkembang ini usaha. kita pi yang menggagas itu pelatihan-pelatihan management dan lain-lain, ada dulu pelatihan setelah dia terima bantuannya ehh kita latih dulu tapi bukan dari pemerintah kita yang laksanakan kenapa kita yang inisiatif agarkedepannya usaha ini dapat dikelola dan berkembang jadi masih banyak itu yang aktif disini “(Hasil Wawancara MMD, 7 November 2018)”.

Hal diatas diperkuat dari pernyataan Ketua Kelompok Kube Reli terkait penyuluhan keterampilan berusaha Mahfud LU yang menyatakan bahwa:

Pelatihan kayak seminar ji pas di awal dibentuk, setelah itu saya yang latih anggota yang lain kebetulan kan saya memang taulah di bidang percetakan begini, jadi saya sendiri yang latih anggota bagaimana menggunakan alat-alat. “(Hasil wawancara MLU, 16 Februari 2019)”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyuluhan keterampilan berusaha benar-benar diadakan oleh Dinas Sosial dengan mendatangkan orang untuk memberikan penyuluhan dalam hal menjalankan usaha. Hal ini perlu di apresiasi atas apa yang dilakukan Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan penyuluhan keterampilan berusaha.

Namun kinerja dari Dinas Sosial masih dinilai minim melihat tidak adanya penyuluhan-penyuluhan berikutnya. Penulis meyakini hal ini sangat perlu dilakukan melihat masyarakat yang tergabung dalam anggota KUBE-FM yang anggotanya adalah masyarakat miskin memerlukan pelatihan keterampilan, sehingga dalam mengelola dan menjalankan usahanya kelompok KUBE ini mendapat pengetahuan yang baru dan meningkatnya kemampuan anggota kelompok tersebut agar usaha yang mereka jalankan bisa berkembang.

Selanjutnya penulis mencoba mencari tahu lebih lanjut terkait fasilitas apa saja yang disediakan oleh pemerintah selain pelatihan. Masalah tempat menjadi perhatian penulis sehingga penulis menggali informasi dan menurut Kepala Bidang Pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial Burhanuddin Ghalib, SE. MM mengatakan bahwa :

Kalau tempatnya itu dibentuk oleh kelompok itu sendiri bukan bahwa kita yang usahakan itu tempat, contoh misalnya kecamatan tallo kelurahan ini, inilah masyarakat yang berinisiatif untuk menyediakan tempatnya, tempatnya sudah dirancang mungkin dia punya rumah disitulah membentuk suatu kelompok supaya kita bisa memberi bantuan “(Hasil Wawancara BHG, 29 Oktober 2018)”.

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa fasilitas berupa tempat tidak disediakan oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan pernyataan ketua Kube Billbon Print Muh. Adam yang menyatakan bahwa:

Kalau persoalan tempat tidak disediakan oleh Dinas Sosial. Ini rumah yang kita tempati untuk jalankan usaha atau tempat produksi punya orang tua “(Hasil Wawancara ADM, 7 November 2018)”

Maka dapat disimpulkan persoalan tempat tidak disediakan oleh pemerintah dan menjadi tanggungan bagi kelompok Kube tersebut.

Proses pelaksanaan pendampingan bagi Kube menjadi sebuah aspek yang berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pemerintah untuk menjalankan program ini demi mencapai keefektifan dalam pelaksanaannya. Pendampingan dari pihak-pihak yang mengetahui merupakan salah satu kebutuhan dasar dari kelompok-kelompok Kube yang terbentuk. Dengan adanya pendampingan ini maka anggota-anggota kelompok dapat terbantu dalam mendapatkan akses informasi tentang program Kube dan dalam menjalankan usaha hingga membantu kelompok untuk memecahkan masalah yang dihadapi selama menjalankan usaha Kube.

Untuk memperjelas proses pendampingan Kube maka penulis menggali informasi dan mewawancarai Kepala Bidang Pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial Burhanuddin Ghalib, SE. MM yang mengatakan bahwa:

Kalau pendampingan ini, di Dinas Sosial Kota Makassar ini mempunyai pekerja-pekerja sosial masyarakat biasa disebut TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) di setiap Kecamatan terdapat anggota TKSK nya, inilah yang membentuk pendampingan untuk mencari masyarakat yang tidak mampu atau istilahnya sekarang KPM (Keluarga Penerima Manfaat) maksudnya orang yang berhak menerima bantuan karena perlu kita ketahui yang pantas diberikan bantuan itu adalah masyarakat yang tidak mampu, kita tidak menyebutnya sekarang miskin tapi disebut sebagai KPM termasuk yang menerima supaya bermanfaat bagi mereka. Yang perlu dibantu adalah orang yang tidak mampu alias orang miskin yang kita bisa kembangkan pertumbuhan ekonominya “(Hasil Wawancara BHG, 29 Oktober 2018)”.

Dari hasil wawancara ini maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pendamping program KUBE ini adalah TKSK maka penulis mewawancarai TKSK Kecamatan Tallo guna menggali informasi. Dalam hal ini Suri mengatakan bahwa:

Kalau tsk itu Tenaga kesejahteraan sosial di kecamatan satu kecamatan itu Cuma satu tsk nya, jadi dia bawahi semua kelurahan yang ada di

kecamatan itu, terus fungsi dan tugasnya itu mendampingi 26 jenis pmks, termasuk mi itu fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan semua-semuanyami, terus dalam hal keterkaitannya dengan kube fakir miskin sebelum ini kube itu terbentuk kita verifikasi dulu, kita kunjungan ke rt/rw nya diminta apa ada, dan ini harus yang punya usaha ada basic jualannya tidak boleh tidak, satu kube itu jumlahnya 10 orang dan harus punya basic jualan yang sama tidak boleh tidak dalam satu kelompok itu ada harus contoh jualan kue jualan kue semua tidak ada yang beda-beda, karena anggarannya itu dikelola dikelompok bukan perorangan “(Hasil Wawancara SRI, 19 November 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan TKSK Kecamatan Tallo dapat dilihat bahwa TKSK bukan hanya mendampingi Kube di setiap Kecamatan namun juga mendampingi jenis-jenis PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), dan keterlibatan TKSK disini tidak hanya mendampingi setelah Kube itu dibentuk namun juga terlibat dalam hal rekrutmen.

Menurut Pembina Chabel Cell Mahmud terkait pendampingan ini mengatakan bahwa:

Untuk pendampingan tidak terlalu didampingi, paling saya sebagai pembinanya yang dampingi, kalau dari Dinas Sosial paling sesekali datang“(Hasil Wawancara MMD, 7 November 2018)”.

Sedangkan menurut ketua kelompok penjahit abadi Sariama terkait pendampingan menyatakan bahwa:

Kalau pendamping biasa ada yang datang paling berapa kali ji selama ini, tidak selalu datang, kadang-kadang saja datang untuk cek-cek “(Hasil wawancara SRM, 15 Februari 2019).

Melihat hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pendampingan pemerintah dilakukan oleh TKSK dan TKSK sendiri tidak hanya mendampingi Kube tapi juga mendampingi jenis-jenis PMKS. Pendampingan terhadap sebuah program dalam hal ini (usaha) adalah hal yang terbilang harus dilakukan terlebih lagi jika yang didampingi belum bisa mengelola dan menjalankan sendiri usahanya. Pendampingan yang sering harus dilakukan mengingat TKSK tidak

bisa selalu mendampingi kelompok Kube. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pendampingan karena mengingat tugas TKSK yang juga terlibat dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Program Kube ini diharapkan mampu mensejahterakan dan membantu fakir miskin untuk menaikkan taraf hidupnya dan mampu mengubah nasibnya. Dari hal tersebut maka perlu diketahui sejauh mana Program ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Pernyataan terkait kriteria yang dilontarkan oleh perangkat pelaksana yang kemudian penulis mencoba untuk menggali informasi melalui masyarakat yang merasakan dampak dari program ini.

Menurut penuturan dari pembina Kube Chabel Cell Mahmud menyatakan bahwa:

sebenarnya kelompok ini dulu tidak berkelompok tapi kan sudah banyak pekerja, setelah diberikan bantuan mulailah management diatur supaya bermakna kerjanya itulah ada pembukuan ada management ditawarkan, pembagian income bagi yang pelaku service, terus pendapatan bonus bagi anggota yang mencari order, terus saya liat disitu kesepakatan untuk mencadangkan modal itu dipake untuk sewaktu-waktu anggota mengalami kesulitan tapi dikembailkan kembali, inilah model yang kita terapkan disini, jadi ada saving untuk kebutuhan anggota yang mendesak, dari sekian keuntungan itu disimpan disitulah model pemberdayaannya. Besar sekali perubahannya, besar sekali karena setelah berkelompok mereka paham yang namanya kerja sama mereka dapat mengembangkan potensinya yang tadinya biasa-biasa saja jadinya pintar dan sekarang anggota sudah beberapa memisahkan diri mandiri, cuman saya kurang tau apakah management setelah berkurang anggotanya itu berpengaruh atau tidak dengan perkembangan usaha yang lama. yang jelas sangat bermanfaat, ada perubahan lah “(Hasil Wawancara MMD, 7 November 2018)”.

Akan tetapi pengakuan berbeda dikatakan oleh Ketua kelompok KUBE

Bilbon Print Muh. Adam menyatakan bahwa:

Yang pasti dengan adanya ini program membantu proses produksi, karena kalau persoalan peningkatan usaha nanti kita terlalu menggambarkan yang tidak-tidak sementara ini kan kegiatannya skala kecil, yah itu tadi tergantung dari orderan dan teman-teman yang di kube

itu bukan ini yang menjadi pekerjaan utama yang namanya saja pekerjaan sampingan (Hasil Wawancara ADM, 7 November 2018)".
 Lebih lanjut pernyataan yang dikatakan oleh ketua kelompok kube

penjahit abadi yang mengatakan bahwa:

Kalau saya ini program sudah bagus, sekarang teman-teman yang dulu berkelompok sudah bisa mandiri semua. Ada yang buka jahitan dirumahnya, sibuk semua dengan usahanya "(Hasil wawancara SRM, 15 Februari 2019).

Selanjutnya penuturan ketua kelompok mawar DG. Ngasih terakit

dampak program yang menyatakan bahwa :

Perbulan itu kita bisa dapat sampai 8 juta perbulan itu, itu yang didapat dibagi juga dianggota yang bekerja "(Hasil wawancara DGN, 29 Oktober 2018)".

Melihat hasil wawancara dengan masyarakat yang merasakan dampak program Kube dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang terlibat didalamnya. Disamping mendapatkan penghasilan juga mendapatkan pembelajaran juga dapat meningkatkan potensinya, namun kube dirasakan tidak menjadi pekerjaan utama bagi sebagian anggota kelompok melainkan menjadi pekerjaan sampingan, artinya dalam suatu kegiatan usaha tidak selamanya berjalan dengan baik.

Dalam proses pelaksanaan program ini tidak sepenuhnya berjalan maksimal karena ada hambatan yang didapati dilapangan sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan

Sosial Burhanuddin Ghalib, SE. MM bahwa:

Hambatan yang sering dialami oleh Dinas Sosial adalah terbatasnya anggaran. Keterbatasan anggaran inilah yang menyebabkan semacam gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat akhirnya lewat LSM, wartawan, semua mengatakan bahwa dinas sosial kota makassar memberi

bantuan pilih kasih. Disini bukan berarti Dinas Sosial pilih kasih, kita memang memilih orang-orang yang memang berhak menerima, yang kedua masih ada yang berhak namun belum menerima karena keterbatasan anggaran, belum mencukupi untuk memberikan sekaligus, jadi mungkin karena bertahap dengan mempergunakan tenaga-tenaga kerja sosial kecamatan memang ada dibidang pilih kasih karena persoalan tersebut. Yang kedua kami dari Dinas Sosial kekurangan tenaga pekerja yang tidak bisa handle setiap kelompok kube, apalagi dalam hal ini yah TKSK tidak hanya terlibat dalam Kube tapi semua jenis PMKS di Dinas Sosial ini. "(Hasil Wawancara BHG, 29 Oktober 2018)".

Melihat hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan suatu program tentu didapati yang namanya masalah yang menghambat jalannya program ini. Proses pelaksanaan program Kube di nilai belum terlalu maksimal karena ada aspek yang belum berjalan maksimal. Indikator yang digunakan belum sepenuhnya berjalan baik tetapi pada beberapa hal telah berjalan dengan baik. Beberapa aspek telah terpenuhi sesuai dengan apa yang penulis temui dilapangan.

D. Ektivitas Proses Monitoring dan Evaluasi Program KUBE-FM di Kecamatan Tallo Kota Makassar

Monitoring dan evaluasi (moneva) merupakan bagian dari manajemen program yang dilaksanakan sebagai upaya pengendalian, agar proses dan hasil dari pelaksanaan Program Kube tercapai sesuai rencana. Monitoring adalah suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah suatu teknik penilaian kualitas program yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Evaluasi diyakini sangat berperan dalam upaya meningkatkan kualitas operasional suatu program

dan berkontribusi penting dalam memandu pembuat kebijakan. Setiap program yang diimplementasikan seyogyanya diikuti dengan sistem pengendalian, dalam bentuk monitoring dan evaluasi, agar setiap tahapan dan hasil yang dicapai dari program tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

Terkait proses monitoring dan evaluasi program KUBE yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, untuk mengetahui lebih jelas mengenai monitoring dan evaluasi program kube, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial Burhanuddin Ghalib, SE. MM yang menyatakan bahwa :

Kalau monitoring tadi atau pengawasan dengan evaluasi biasa kita lakukan, biasa kita datang sendiri, nanti kita mendatangi kelompok tersebut kita lihat masih lanjutkah ini usahanya baru nanti itu. jadi pengawasan seperti itu biasa dilakukan, berkembang kah atau tidak disitu juga kita bisa tau apa-apa saja kendalanya atau biasa kesulitan yang dihadapi nanti kita beri saran atau apa. Jadi begitu pengawasannya, diawasi itu kelompok. Kalau evaluasinya kan kita menunggu instruksi dari pusat, misalnya setiap tahun ada yang mati kelompoknya atau terhambatki karena apa, itu lah nanti yang menjadi bahan evaluasi kita hanya menjalankan saja “(Hasil wawancara BHG, 29 Oktober 2018)”.

Melihat hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial melakukan pengawasan dengan kunjungan langsung ke Kube tersebut, dengan memantau perkembangan serta kendala-kendala yang dihadapi kelompok kube. Sedangkan untuk evaluasinya sendiri hambatan yang dialami kelompok akan menjadi bahan evaluasi penanggung jawab program.

Selanjutnya untuk memperjelas monitoring dan evaluasi maka penulis menggali informasi melalui Ketua Kube Billbon Print Muh. Adam yang menyatakan bahwa:

Kalau Kontrol secara rutin mungkin tidak, ada kunjungan biasanya di kube ini karena kube disini masih berjalan, biasanya ada kube itu cuman sekedar kube-kube setelah itu mati suri, kalau kube disini memang masih berjalan, cuman tergantung dari orderannya, tergantung dari orderan yang jelas kube ini sendiri masih berjalan begitu intinya. Cuman tidak seperti percetakan besar yang lainnya orderan yang masuk juga tidak setiap hari didapatkan kecuali kalo sudah percetakan besar pasti lain cerita, dari segi manajemennya pasti berbeda, inikan saya jadikan saja sebagai tempat usaha disamping untuk pembelajaran/edukatif atau workshop “(Hasil Wawancara ADM, 7 November 2018)”.

Lebih lanjut mengenai monitoring penulis mewawancarai Kelompo Kube

lainnya yaitu sekretaris kelompok Nusa Indah V yang mengatakan bahwa:

Satu kali ji pernah datang kesini orang dari kantor cuman liat-liat baru tanya-tanya tentang ini usaha yang dibikin, kan ini juga jualan masih jalan begitu “(Hasil wawancara LED, 16 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok dan sekretaris kelompok kube bahwa pengawasan memang dilakukan oleh instansi yang terkait, namun pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait terbilang jarang, bahkan menurut pengakuan salah satu kelompok kube pengawasan yang dilakukan hanya satu kali itupun hanya untuk sekedar mengecek dan mengontrol jalannya kelompok tersebut. Lemahnya monitoring yang dilakukan Dinas Sosial harus menjadi perhatian lebih oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial. Dinas sosial sebagai Instansi yang bertanggung jawab seharusnya dapat lebih sering dalam hal monitoring agar program dapat berjalan baik sesuai dengan rencana dan tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab.

Selanjutnya evaluasi program ini adalah hambatan-hambatan yang dialami baik dari instansi yang terlibat dan pelaksana maupun masyarakat yang terlibat dalam kelompok usaha bersama yang cukup mempengaruhi jalannya program ini.

Mengacu pada hal tersebut penulis mencari informasi ke Kepala Bidang Pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial Burhanuddin Ghalib, SE.

MM menyatakan bahwa:

Hambatan yang sering dialami oleh Dinas Sosial yaitu tadi terbatasnya anggaran juga terbatasnya SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial untuk handle setiap kelompok Kube. Dari tahun ketahun program ini diturunkan kami selalu kekurangan tenaga pekerja untuk program ini. “(Hasil Wawancara BHG, 29 Oktober 2018)”.

Dari hasil pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa terbatasnya anggaran merupakan kendala yang dialami dan berdampak pada masyarakat yang menimbulkan terjadinya gesekan didalamnya. Dinas Sosial sebagai *stakeholder* telah menentukan kriteria yang ditentukan namun masih banyak masyarakat yang kurang menerima. Yang dialami juga dilapangan masih ada warga yang berhak namun belum berhak menerima bantuan salah satu penyebab terbatasnya anggaran.

Selanjutnya TKSK Kecamatan Tallo Suri menyatakan terkait hambatan yang dialami bahwa:

Kalau menurut saya program kube sangat bagus sepanjang anggotanya tidak ada yang egois dan kalau ada yang egois pasti tidak berjalan dengan baik pasti hancur, itulah yang menjadi hambatan karena mereka berpikir ketua Kube akan mendapatkan pendapatan lebih padahal itu tidak. Kalau yang sukses itu akan diberi lagi bantuan untuk pengembangan usaha dan akhirnya darikube itu mereka bisa mandiri satu-satu tidak bergantung di kube lagi ada usaha masing-masing “(Hasil Wawancara SRI, 19 November 2018)”.

Penuturan diatas selaras dengan apa yang penulis temui dilapangan, salah satu kelompok yang tidak berjalan lagi yaitu Kelompok mujur, penulis mewawancarai Ketua Kelompok Mujur Dra. Asniwati L yang mengatakan bahwa:

Ini kube mati semenjak ada yang meninggal anggota, terus saling cemburui, contohnya ada yang jaga terus dia tidak bisa jaga nabilang mi tidak dikasi nanti hasilnya, padahal nanti bakalan di bagi rata hasilnya yang bekerja. Disini dulu warungnya, habismi dibagi rata semua bahan-

bahan, dari pada saling iri begitu “(Hasil wawancara ANT, 16 Februari 2019)”.

Dari hasil wawancara tersebut kelompok Kube dapat berjalan dengan baik dan berjangka waktu panjang jika anggota didalam kelompok saling percaya satu sama lain dan transparan juga didalamnya tidak ada yang namanya kecemburuan satu sama lain. Dalam hal ini permasalahan internal kelompok juga harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah mengingat permasalahan internal juga dapat memicu kegagalan dalam program tersebut.

Melihat kondisi tersebut bahwa program ini kurang berjalan lancar akibat adanya kesalahpahaman dari pelaksana maupun sasaran. Bukan hanya pelaksana yang merasakan hambatan akan tetapi dari masyarakat yang terkena dampak pun merasakan hambatan tersebut seperti penuturan dari Pembina Kube Chabel Cell Mahmud yang mengatakan bahwa :

Hambatan yang didapatkan, mungkin tidak semua ini anggota yang ikut ini tidak semua paham cuman yang pertama kali kita ajarkan berdasarkan struktur yang pegang jabatan ada ketua bendahara dan sekretaris, kalau saya liat ini yang 3 yang pandailah mengatur jadi tidak susah “(Hasil Wawancara MMD, 7 November 2018)”.

Melihat pernyataan diatas, masalah yang dialami kelompok tersebut adalah permasalahan SDM, hal ini menunjukkan pentingnya pendampingan dan juga pelatihan yang sering agar kemampuan anggota dalam menjalankan usaha akan meningkat baik dari segi manajemennya, kualitas produk yang dihasilkan, maupun peningkatan penghasilan dalam kelompok agar usaha yang telah dibangun akan berkembang.

Sedangkan hambatan berbeda dirasakan oleh Ketua Kube Billbon Print yang menyatakan bahwa :

kalau sablon itu selalu berkembang terus, jadi kalau misalnya kita menginginkan ini kalau dikasi hanya yang manual kan orang sudah pakai digital sekarang, sekarang kita mau mencoba minta mesin tidak bisa dicover karena dananya cuman sedikit. Cuman saran saya di dinas sosial itu seharusnya memberi alat itu harus sesuai dengan perkembangan zaman juga, tapi dipahami juga karna kube itu bantuannya paling 20 jt, sementara alat percetakan seperti mesin, itu saja print digital tidak bisa diberi karena mahal, paling yang dibelikan printer, komputer, alat-alat sablon yang manual-manual “(Hasil Wawancara ADM, 7 November 2018)”.

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi masalah dalam usaha di bidang tertentu, seperti pernyataan diatas keterbatasan anggaran dalam hal menyediakan alat yang menjadi kebutuhan kelompok Kube. Perkembangan zaman dan teknologi harus menjadi pertimbangan bagi penanggung jawab program ini sebab perkembangan zaman dan kemajuan teknologi juga sedikit mempengaruhi jalannya program ini.

Untuk lebih memperjelas Program Kube penulis menemui Kube yang tidak beroperasi lagi, penulis mencari tahu penyebab Kelompok KUBE yang tidak berjalan tersebut. Penulis melakukan wawancara dengan Ketua Kelompok Cakrawala terkait penyebab tidak beroperasinya Kelompok Kubenya yang mengatakan bahwa:

Masalahnya itu orderan yang sepi, baru kayak tidak perputaran uangnya kecil sekali, kebetulan tempatnya juga ini masuk lorong jadi banyak yang tidak tau kalau disini ada percetakan, paling anggota yang lain yang keluar pasarkan ini. tapi karena orderan sama tempat dan pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan itu banyak cari pekerjaan lain “(Hasil Wawancara SRY, 16 Februari 2019)”.

Selanjutnya penulis mewawancarai kelompok kube lainnya yang sudah tidak berjalan yaitu Kelompok Penjahit Abadi, Ketua Kelompok Sariama mengatakan bahwa:

Berdiri masing-masing semua, ini memisahkan diri, adami yang mandiri, ada usahanya masing-masing ada juga yang menjahit dirumahnya, sekarang tidak berkelompok lagi “(Hasil wawancara SRM, 15 Februari 2019)”.

Dari pernyataan dapat disimpulkan bahwa Kelompok Usaha Bersama yang tidak berjalan lagi disebabkan karena penghasilan yang minim juga masalah tempat serta pemasaran. Hal ini yang menjadi kendala sehingga kelompok Kube tidak bisa dilanjutkan, hal ini yang perlu menjadi perhatian lebih dari pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Makassar agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Disatu sisi Kelompok Usaha Bersama yang tidak beroperasi lagi disebabkan anggota dari kelompok tersebut memisahkan diri dan mendirikan usaha sendiri, hal ini perlu diapresiasi karena melalui program ini masyarakat yang terlibat dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya serta keterampilan individu yang dimiliki.

Berangkat dari hal tersebut penulis mewawancarai dari pihak Dinas Sosial terkait kendala yang ditemui kelompok kube tersebut, Kepala Bidang Pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial Burhanuddin Ghalib, SE. MM mengatakan bahwa :

Itu susah juga kalau misalnya dibelikan alat sablon yang modern baru dana juga terbatas. Terus masalah tidak berjalan lagi itu kelompok kemarin sudah memang berusaha dipertahankan tapi kalau memang tidak bisa lagi dipertahankan mau diapa. Itu sudah dicoba carikan cara misalnya usahanya dibuatkan apalah yang menjadi kelebihanannya dari yang lain baik dari tampilannya atau kualitas bahan tapi yah kalau memang tidak bisa dipertahankan yah sudah, setidaknya kita sudah coba pertahankan usahanya “(Hasil wawancara BHG, 15 Februari 2019)”.

Dari penuturan diatas penulis mencari lebih lanjut informasi dari pendamping Kube dalam hal ini TKSK Kecamatan Tallo yang menyatakan bahwa:

Dicarikan solusi misalnya kalau sepi orderan dibuatkan lagi kemasan yang unik sehingga menarik minat konsumen atau dipasarkan lewat media online dan promosi. Kalau saya promosinya harus lebih di giatkan supaya orang tau “(Hasil wawancara SRI, 16 Februari 2019)”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial selaku pelaksana program ikut aktif memberikan solusi terkait kendala yang dihadapi kelompok-kelompok Kube. Berangkat dari hal tersebut Evaluasi diyakini sangat berperan dalam upayameningkatkan kualitas operasional suatu program. Evaluasi dan respon yang cepat dari pemerintah diperlukan agar hambatan atau kendala yang didapati kelompok selanjutnya tidak terjadi lagi.

Jadi jika kita melihat secara keseluruhan maka kita mengetahui bahwa semua memiliki hambatan yang mempengaruhi keberhasilan yang ingin dicapai. Hambatan yang ada pada program ini menjadi pekerjaan rumah baik dari internal maupun masyarakat yang menjadi anggota Kube. Pengawasan terhadap kinerja pelaksana dan pengawasan yang lebih sering ke kelompok yang telah menjalankan program ini agar tidak terjadinya kegagalan dalam menjalankan program ini. Dari fungsi Dinas Sosial ini besar harapan untuk mengurangi tingkat kemiskinan terkhusus di Kecamatan Tallo Kota Makassar.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kecamatan Tallo Kota Makassar sebagai berikut:

1. Proses Sosialisasi Program KUBE-FM di Kecamatan Tallo Kota Makassar belum efektif dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana dalam hal ini Dinas Sosial cuman sekali dilakukan terhitung sejak program bantuan akan diturunkan. Proses sosialisasi harusnya lebih sering dilakukan oleh Dinas Sosial sehingga proses ini benar-benar menyentuh masyarakat miskin di Kecamatan Tallo.
2. Proses Pelaksanaan Program KUBE-FM di Kecamatan Tallo Kota Makassar menurut penulis berjalan kurang efektif sebab masih ada proses pelaksanaan program KUBE-FM yang belum maksimal dilihat dari penyuluhan keterampilan berusaha yang cuman dilakukan pada saat pembentukan Kelompok KUBE dan tidak adanya penyuluhan-penyuluhan berikutnya serta pendampingan yang belum berjalan maksimal.
3. Proses Monitoring dan Evaluasi program KUBE-FM di Kecamatan Tallo Kota Makassar juga belum maksimal sebab monitoring dari pihak instansi terkait cuman sesekali dilaksanakan dan hanya sekedar memastikan masih berjalan atau tidaknya usaha yang dilakukan serta respon dengan memberikan solusi kepada kelompok yang mengalami kendala dan evaluasi yang dilakukan terkait

hambatan yang dialami oleh kelompok akan disampaikan ke pusat hal ini yang perlu menjadi perhatian lebih mengingat evaluasi sangat berperan dalam upayameningkatkan kualitas operasional suatu program danberkontribusi penting dalam memandu program selanjutnya.

Jadi menurut hemat penulis efektivitas pelaksanaan program kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM) di Kecamatan Tallo Kota Makassar belum berjalan efektif jika ditinjau dari seluruh aspek yang penulis kemukakan. Tujuan dari program ini belum terealisasikan dengan baik karna dari ketiga indikator belum berjalan dengan baik dan masih menemui hambatan yang menjadi pekerjaan rumah dari instansi terkait. Tujuan utama dari KUBE ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat perekonomian fakir miskin akan tetapi dilapangan penulis belum melihat dan menemui hal tersebut. Penulis perlu mengapresiasi kinerja yang baik dari instansi terkait namun masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian dan evaluasi untuk kedepannya terkhusus di Kecamatan Tallo Kota Makassar.

B. Saran

1. Sebaiknya proses sosialisasi yang dilakukan harus lebih masif sehingga lebih banyak masyarakat yang mengetahui program tersebut.
1. Seharusnya Pendampingan yang dilakukan oleh instansi terkait harus lebih sering lagi agar program ini dapat berjalan lebih maksimal lagi disamping itu peralatan yang diberikan perlu lebih di maksimalkan agar usaha dari Kube meningkat dalam segi produktivitas sehingga dari beberapa indikator

pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas terkait benar-benar sesuai apa yang diharapkan.

2. Sebaiknya anggaran yang disediakan untuk penerima bantuan KUBE –FM di Kecamatan Tallo di lebihkan, sebab bantuan yang diberikan menjadi modal awal untuk memulai usaha hingga berkembang dan majunya sebuah usaha. Hal yang perlu dipertimbangkan jumlah anggota yang tergabung dalam kelompok KUBE-FM yang berjumlah 10 orang tentu dibutuhkan modal yang besar, jika modal usaha yang diberikan kecil maka perputaran uangnya juga kecil sementara banyak keluarga yang akan dihidupi melalui program tersebut.
3. Sebaiknya Pelatihan diperadakan secara terus-menerus agar usaha yang dijalani kelompok tersebut mengalami kemajuan baik dari segi keterampilan maupun pemasaran yang dilakukan.
4. Seharusnya khusus Program tenaga pekerja untuk program KUBE lebih di maksimalkan mengingat banyaknya kelompok yang mendapat bantuan juga harus memiliki jumlah pendamping yang lebih.
5. Seharusnya Monitoring lebih sering lagi dilakukan agar kendala-kendala yang dihadapi dapat di minimalisir yang akan merugikan keberhasilan program tersebut.
6. Sebaiknya Evaluasi lebih dimaksimalkan lagi sebab Evaluasi diyakini sangat berperan dalam upayameningkatkan kualitas operasional suatu program danberkontribusi penting dalam memandu jalannya kebijakan. Jika lemahnya sistem pengendalian ini, merupakan peluang yang lebar terjadinya kesalahan pada implementasi program kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi.2016.*Manajemen Pelayanan PublikAparatur Sipil Negara*.Makassar: Edukasi Mitra Grapika.
- Danim, Sudarwan. 2004.*Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta:Rineka Cipta
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, 2006, *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin – Tahun Anggaran 2006*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin
- Hasibuan, Melayu SP.2008.*Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*.Jakarta:PT Bumi Aksara
- Indrawijaya, Adam Ibrahim.2010.*Teori, perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama
- Lubis dan Martani. 1987. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Moenir, H.A.S.2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta:PT.Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P., 2006. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- Sugiyono,2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Suradi, 2009. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Studi Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Lima Provinsi*, Jakarta : Departemen Sosial RI
- Suratman.2017.*Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: CAPIYA Publishing
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1984. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES
- Westra, Pariata, DKK. 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung
- Winarno, budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta:CAPS

Internet :

Arja Sadjiarto.2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol.2,No.2 diakses pada tanggal 16 Juli 2018

kua-ci.blogspot.com pedoman-kube. Diakses pada tanggal 18 Juli 2018

Kemosos.go.id content kube diakses pada tanggal 17 Juli 2018

Makassar. Tribunnews.com diakses pada tanggal 16 Juli 2018

Michael S. Mantri. 2016 Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pemberdayaan Masyarakat diakses pada tanggal 28 juli 2018

Oasis Braga 2014 Kube-Blogspot.co.id diakses pada tanggal 16 juli 2018

Peraturan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah RI NO.42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS SOSIAL

Jl. A.R. Hakim No. 50 Telp. (0411) 448313 Makassar

DATA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
TAHUN 2015

KECAMATAN MANGGALA

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS USAHA	PENGURUS
1	KELOMPOK BATUA	JL. INSPEKSI PAM	Menjahit Pakaian	Ketua : Rahmawati Sekretaris : Mardia Bendahara : Reski Amalia Anggota : Muliati Darmawati Misnawati Lia Anti Ningsih Bunga
2	KELOMPOK MENJAHIT SAKINAH	JL. BAITURRAHMAN RT. 04 / RW. 16 MAKASSAR	Menjahit Pakaian	Ketua : R. Ela Rahayu Sekretaris : Mardatillah Bendahara : Nirma Anggota : Nurjannah Sri Nugroho Ernawati Santi Andi Nani Raodah Hasnah

KECAMATAN MAKASSAR

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS USAHA	PENGURUS
1	KELOMPOK SIPAKATAU	JL. ABU BAKAR LAMBOGO NO. 197	Pembuatan Kue Basah & Kering	Ketua : Hamriah Sekretaris : Sadiyah Bendahara : Suarna Anggota : Rukiah Hasniar Raliah Yohana Nurhaidah Dawiah

				Hafidah Z
2	KELOMPOK ANUGERAH	JL. MACCINI TENGAH NO. 11 A	Pembuatan Kue	Ketua : Nuraeni Sekretaris : Kasmawati Bendahara : Nurmianti Anggota : Hasliah Hubu Intang Andi Ara Harmin Wahidahayani Rahmatia DG, Mudding

KECAMATAN BIRINGKANAYA

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS USAHA	PENGURUS
1	KELOMPOK TAGANA MAKASSAR	JL. KAPASA RAYA NO. 16 MAKASSAR	Pencucian Motor	Ketua : Racmat Amir Sekretaris : Rafiuddin Bendahara : Syaelan Latif Anggota : Sandi Muchlis Syamsul alam Syahrir Hendratmo Akhirul Dadang
2	KELOMPOK MENJAHIT WULAN	JL. MANYNYIKOAYA RT.04 / RW.04	Menjahit Pakaian	Ketua : Masida Sekretaris : Hawariani Bendahara : Tripuspitasari Anggota : Sitti Fatmah Hj. Nuri Ramlaeni Nurhayati Nuraeni Zubaedah Jumriah

KECAMATAN BONTOALA

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS USAHA	PENGURUS
1	KELOMPOK HATI MULYA	Jl. BAYAM LR. 3	Jual Kue-kue Tradisional, Gorengan dan Makanan Siap Saji.	Ketua : Fatmawati Sekretaris : Irmawati Bendahara : Kartini Anggota : Rosnia Rahmatia Surianis Sulastri

				Saharia Dg. Nia Salma
--	--	--	--	-----------------------------

KECAMATAN TALLO

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS USAHA	PENGURUS
1	KELOMPOK NUSA INDAH V	JL. INDAH 3 RT. 07 RW. 05	Pembuatan Kue Kering, kue Bolu & Pastel.	Ketua : Marni Gobel Sekretaris : Lili Evendi Bendahara : Ferawati Anggota : Ita Nimmi Marni Nuralam Cece Suryanti Irene Yulianti Syamsiah
2	KELOMPOK MUJUR	Jl. Muh. Jufri IX No. 3	Jual Campuran	Ketua : Dra. Asniwati Sekretaris : Sumarni Bendahara : Dg. Tene Anggota : Saharia Irmawati Suriati Kasimin Bambang Basse Dg. Tia Sukirman
3	KELOMPOK R.K CAKRAWALA	JL. KANDEA 3 LR. 4 NO. 15 MAKASSAR	Percetakan & Sablon	Ketua : Surya Sekretaris : Andas Abbas Bendahara : Syahril Anggota : Kristian M. Taufiq Mansyur A. Agung M. Akbar Sunaryo Jufriadi
4	KELOMPOK BILLBON PRINT	JL. KANDEA 3 LR. 7 NO. 7 MAKASSAR	Percetakan & Sablon	Ketua : Muh. Adam Sekretaris : Muh. Yusuf Bendahara : Halmia Anggota : Syarifuddin B Dahlan Wahida A. Yarham M. Yusuf Sultan

				A. Zainuddin
5	KELOMPOK MAWAR	JL. PANNAMPU LR. 1 MAKASSAR	Kerajinan Rotan	Ketua : Dg. Ngasih Sekretaris : Murni Bendahara : Darmawati Anggota : Dg. Tuo Dg. Ngugi Suri Dg. Te'ne Dg. Bacce Dg. Ballung Mutmainna
6	KELOMPOK CHABEL CELL	JL. KANDEA 3 LR. 6 NO. 22 MAKASSAR	Service Handphone	Ketua : Ridwan Sekretaris : Syarifuddin Bendahara : Mansyur Anggota : Yusuf Nabil R Hasrul Muh. Risal Hasan Hasanuddin Sofyan
7	KELOMPOK RELI	JL. REGGE 5 NO. 2	Percetakan & Sablon	Ketua : Mahfud LU Sekretaris : Khaeruddin Bendahara : Dermawan Anggota : Muh. Hasyim Aslam M. Akbar Aswin salam Hidayat Diding Ruslan
8	KELOMPOK ABADI	JL. NAJA DG. NAI RT.03 / RW. 01	Menjahit	Ketua : Sariama Sekretaris : Angraeni Bendahara : Andi Sapada Anggota : Rahmawati Subaedah Raenang Hasmah A. Ramlah Amsia Tamsir Harida

KECAMATAN UJUNG TANAH

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS USAHA	PENGURUS
1	KELOMPOK ABID	JL.SABUTUNG TIMUR LR.3 NO.21	Menjahit Pakaian	Ketua : Asri Sekretaris : Marlinda Bendahara : Marlina Anggota : Abd. Rasyid Hj. Sumiati Muh. Idris Rahmadi Mualim Marlia Muarif

KECAMATAN TAMALANREA

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS USAHA	PENGURUS
1	KELOMPOK PENJAHIT AMMAR	BTP BLOK AE NO. 43 MAKASSAR	Menjahit Pakaian	Ketua : Rahmawati Sekretaris : Jumasia Bendahara : Abd. Razak Anggota : Hasnia Saleha Wati Salmiah Mariama Jahira Nur Cahya

KECAMATAN WAJO

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS USAHA	PENGURUS
1	KELOMPOK SATU DELAPAN PULUH	JL. KODINGARENG LR. 180 MAKASSAR	Pembuatan Kue Tradisional	Ketua : Fadli Sekretaris : Salma Bendahara : Rostini Anggota : Mulyani Herianto Kastiah Nursiah Abd Hamsah Ilham Maulana M

KECAMATAN PANAKUKANG

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS USAHA	PENGURUS
1	KELOMPOK MANDIRI	JL. PAMPANG 4 RT.04/RW02	Ternak Ayam	Ketua : Anshar Sekretaris : Dg. Tamrin Bendahara : Darwis Anggota : Muh Amin Abd Rahman Syukri Buang Irianto Akbar Syamsu Untung Iriadi

KECAMATAN TAMALATE

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS USAHA	PENGURUS
1	KELOMPOK PENJAHIT "AN NUR"	Jl. Muh. Tahir RT. 04 / RW. 02	Menjahit Pakaian	Ketua : Hasbiah Hafid Sekretaris : Amelia Bendahara : Dita Novita Anggota : Nurnita Mudmainnah Mantasia Risma Hasniah Ernawati A. Surgawi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
 Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

noor : 1673/FSP/A.1-VIII/X/1439 H/2018 M
 pp. : 1 (satu) Eksamplar
 : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
 Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
 Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
 Di -
 Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada

Nama Mahasiswa : Muh Huzair Arby
 S t a m b u k : 10561 05078 14
 J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara
 Lokasi Penelitian : Di Kecamatan Tallo Kota Makassar
 Judul Skripsi : "Efektivitas Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (Kube-FM) di Kecamatan Tallo Kota Makassar"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 12 Oktober 2018

Dekan
 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 Universitas Muhammadiyah Makassar

 Dr. Buchanuddin, S.Sos, M.Si
 NBM no 1084/366

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail: lp3mmuh@ptlaxa.com



73/Izn-5/C.4-VIII/X/37/2018

1 (satu) Rangkap Proposal
Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

03 Safar 1440 H
12 October 2018 M

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1673/FSP/A.1-VIII/X/1439 H/2018 M tanggal 12 Oktober 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MUH HUZAIR ARBY**
No. Stambuk : **10561 05078 14**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Efektivitas Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (Kube-FM) di Kecamatan Tallo Kota Makassar"

yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 Oktober 2018 s/d 13 Desember 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

الله أكبر

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 7671/S.01/PTSP/2018
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Wakil Kota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 73/zn-5/C.4-VIII/X/37/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : MUH HUZAIR ARBY
Nomor Pokok : 105610507614
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:
" EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA FAKIR MISKIN (KUBE-FM) DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 15 Oktober s/d 15 Desember 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 15 Oktober 2018

A.A. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMEN SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Np : 19610513 199002 1 002

Terselasaan Yth:
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Penitipgal

SNMP PTSP 15-10-2018



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615837 Fax +62411 – 3615867
Email : kcsbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 17 Oktober 2018

Kepada

070 / 4573 -II/BKBP/X/2018

- Yth. 1. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR
- 2. CAMAT TALLO KOTA MAKASSAR

Izin Penelitian

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 7671/S.01/PTSP/2018 Tanggal 16 Oktober 2018, Perihal tersebut, di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

NAMA : MUH HUZAIR ARBY
 Nim/Jurusan : 105610507614 / Ilmu Adm. Negara
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259,, Makassar
 Judul : "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA FAKIR MISKIN (KUBE-FM) DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR"

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober s/d 15 Desember 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperiunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Drs. IRYANSJAH R. PAWELLERI, M.P.

Pangkat : Pembina
NIP : 19621110 198603 1 042



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS SOSIAL**

Jalan A. R. Hakim No.50 Makassar 90211
Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313
email : dinassosialmakassar@gmail.com



Makassar, 17 Desember 2018

an : 460/1734/Dinsos/XII/2018
: -
: Keterangan Telah
: Selesai Mengadakan Penelitian

Kepada Yth. Ketua LPJM Unismuh
Di
Makassar

Dengan Hormat,

Schubungan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070/4513-II/BKBP/X/2018, Tanggal 17 Oktober 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

Nama : **MUH HUZAIR ARBY**
NIM/ Jurusan : 105810507814/Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
Judul : **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN POROGRAM
KELOMPOK USAHA BERSAMA FAKIR MISKIN
(KUBE-FM) DI KECAATAN TLLO KOTA MAKASSAR "**

Untuk mengadakan Penelitian pada Instansi/ Wilayah Bapak dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober s/d 15 Desember 2018.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan terima kasih atas kerjasamanya.



Dra. HARTATLAS, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 1964114 199203 0 005

:
nit Pelaksana Teknis PPT Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul-sel di
: yang bersangkutan

Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak BHG, selaku Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar (29/10/2018)



Gambar 2. Wawancara Bapak ARF, selaku Staff Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin (5/11/2018)



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu SRI, selaku TKS Kecamatan Tallo
(19/11/2018)



Gambar 4. Wawancara dengan ADM, selaku Ketua Kelompok Billbon Print
(7/11/2018)



Gambar 5. Wawancara dengan MMD, selaku Pembina Kelompok Chabel Cell
(7/11/2018)



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu SRM, selaku Ketua Kelompok Abadi
(15/2/2019)



Gambar 7. Wawancara dengan Ibu LED, selaku Sekretaris Kelompok Abadi
(15/2/2019)



Gambar 8. Wawancara dengan Ibu DGN, selaku Ketua Kelompok Mawar
(29/10/2018)



Gambar 9. Wawancara dengan Ibu ANT, selaku Ketua Kelompok Mujur
(16/2/2019)



Gambar 10. Wawancara dengan SRY, selaku Ketua Kelompok Cakrawala
(16/2/2019)

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Muh Huzair Arby, dipanggil Koko lahir pada tanggal 6 Mei 1996 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami istri Muh Arsyad Da'di dan Bey S.K. Neu. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Tamamaung II Kota Makassar pada tahun 2003 selama 3 tahun lalu pindah ke SD Labuang Baji II Kota Makassar dan selesai pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di tingkat menengah pertama di MTsN Model Makassar dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah ke atas di MAN 2 Model Makassar dan selesai pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberi kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang insha Allah nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat.